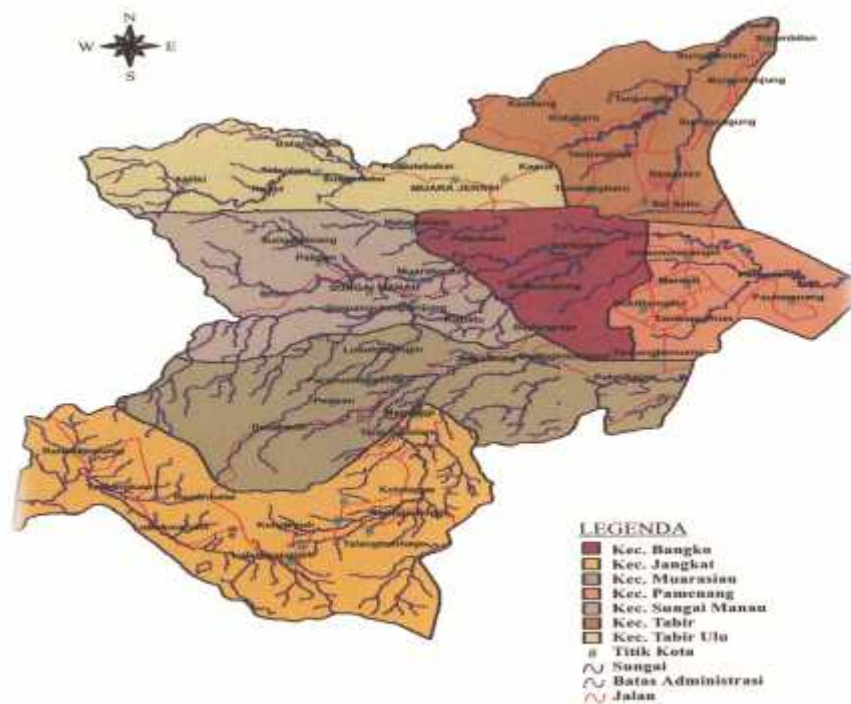




# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2018-2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**

Jln. Jenderal Sudirman Km.3 Telp (0746) 21511 Fax (0746) 322494

**BANGKO**  
**2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga terlaksananya penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018–2023.

Rencana strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin memuatkan yang diawali dengan pendahuluan, tugas dan fungsi, gambaran umum kondisi daerah, visi, misi, tujuan sasaran, strategi, program, kegiatan dan matriks lampiran merupakan bahagian yang tak terpisahkan. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dalam rangka untuk menetapkan kebijakan, serta langkah-langkah program prioritas pembangunan peternakan dan perkebunan periode tahun 2018–2023 di Kabupaten Merangin.

Demikian dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan rencana strategis ini kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan masa yang akan datang.

Bangko, Juli 2019

Kepala Dinas  
Peternakan dan Perkebunan  
Kabupaten Merangin



KOPRAWI, SP  
NIP. 19630618 198709 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Landasan Hukum .....	2
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4.    Sistematika Penulisan .....	5
BAB II      GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	8
2.1.    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2.    Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.3.    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.4.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin .....	39
BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	42
3.1.    Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	42
3.2.    Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	43
3.3.    Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	45
3.4.    Analisa Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	48
3.5.    Penentuan Isu-isu Strategis .....	50
BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN .....	52
4.1.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	52
BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	54
BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN INDIKATIF .....	56
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	65
BAB VIII   PENUTUP .....	67
LAMPIRAN .....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2018 .....	18
2.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Eselon Tahun 2018 .....	18
2.3. Jumlah Kekuatan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Status Pegawai 2018 .....	18
2.4. Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018 .....	19
2.5. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2017 Menurut Jabatan dan Tingkat Penjurangan .....	19
2.6. Data Aset Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2018 .....	20
2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 .....	21
2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 .....	25
2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 .....	29
2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2017-2018 .....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin .....	41
3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati .....	44
3.3. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	45
3.4. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jambi serta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	46
3.5. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	47
<u>Rencana Strategis (Renstra) Disnabun Tahun 2018-2023</u>	11

3.6.	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	48
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan .....	51
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023 .....	53
5.2.	Keterkaitan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023 ....	54
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 .....	58
7.1.	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 .....	65
7.2.	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1.	Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Merangin .....	17

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
2.1. Cascading Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023	68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 151 ayat (1), yang berbunyi : "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif".

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas, diteruskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin, ditetapkan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 adalah derivasi dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan penjabaran program dan kegiatan jangka menengah 5 (lima) tahunan sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang

Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan dan perkebunan di Kabupaten Merangin lima tahun kedepan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin (Renja) sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra OPD) Dinas Peternakan dan Perkebunan disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 03);

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanian Sub sektor Peternakan dan Perkebunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

### 1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 ini bertujuan untuk :

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan Bidang Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan.
3. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, terdiri dari :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD.

### 2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota.

### 3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD pada tahun rencana.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang disajikan dalam tabel.

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN

Pada bagain ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

## BAB VIII. PENUTUP

## LAMPIRAN

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin, ditetapkan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

#### A. Tugas Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan.

#### B. Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

- a. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- e. Pengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantu di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tupoksi diatas Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dibantu oleh sekretaris Dinas dan beberapa kepala Bidang secara lengkap tertera di bawah ini :

## 1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- g. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Program.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Program;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Program;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Program;
- d. Pengkoordinasian Penyusunan perencanaan bidang Program;
- e. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategis (RESTR) dinas;
- f. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- g. Pengkoordinasian Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
- h. Pengkoordinasian Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- i. Melakukan perumusan, perencanaan umum, analisa komponen dan anggaran pembangunan Peternakan dan Perkebunan;



- j. Melaksanakan penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan jangka pendek,
- k. Melaksanakan penyusunan program pembangunan Peternakan dan Perkebunan;
- l. Melaksanakan koordinasi antara sekretariat dan bidang;
- m. Melakukan identifikasi dan perumusan potensi dibidang Peternakan dan Perkebunan;
- n. Perencanaan operasional standar pelayanan di bidang Peternakan dan Perkebunan;
- o. Penyusunan statistik dan sistem informasi di bidang Peternakan dan Keswan serta Perkebunan
- p. Melakukan peramalan dan perhitungan data statistik di bidang Peternakan dan Perkebunan;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- r. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Peternakan dan Perkebunan;
- s. Penyusunan pelaporan tahunan, lakip, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertenakan dan kesehatan hewan .

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Penyusunan perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Menyusun program kegiatan, rencana kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Melakukan upaya program percepatan peningkatan populasi ternak melalui peningkatan angka kelahiran;
- g. Melaksanakan pembinaan teknologi perbibitan dan produksi peternakan baik pada ternak maupun pakan;
- h. Melaksanakan pembinaan pengembangan perbibitan dan sentra produksi peternakan;
- i. Menginventarisasi dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan;

- j. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan yang meliputi distribusi, redistribusi ternak serta administrasi;
- k. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan perbibitan dan produksi peternakan;
- l. Melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Perkebunan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perkebunan;
- c. Penyusunan perencanaan bidang Perkebunan;
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengawasan perbenihan komoditas perkebunan;
- e. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Perkebunan;
- f. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan teknologi produksi;
- g. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan peningkatan produksi;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait;
- i. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sumber daya perkebunan;
- j. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan perkebunan, kebakaran;
- k. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan penanganan Gangguan Usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang lain;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, usaha pengolahan dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;

- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Penyusunan perencanaan bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Menyusun rencana program kegiatan dan rencana kerja bidang Kelembagaan Usaha, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan dan Perkebunan;
- f. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan peternakan dan perkebunan;
- g. Membimbing penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- h. Melaksanakan pembinaan sistem penyuluhan, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- i. Membimbing penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- j. Melaksanakan analisa dan kelayakan usaha;
- k. Melaksanakan promosi dan pemasaran;
- l. Memberikan rekomendasi usaha;
- m. Menjalin mitra kerja bapak angkat dan peluang investasi;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan kelembagaan usaha Peternakan dan Perkebunan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan selain dibantu oleh beberapa pejabat eselon III, juga dibantu oleh beberapa UPTD Teknis di Lapangan diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. UPTD Balai Pembibitan Ternak

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan melaksanakan penyediaan bibit ternak unggul yang berkualitas serta pelayanan pengembangan pembibitan ternak Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten di UPTD Balai Pembibitan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Pembibitan Ternak Mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan Pembinaan Terhadap UPTD Balai Pembibitan Ternak dalam mengembangkan Balai Pembibitan Ternak unggul;
- b. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Pelayanan dan Pengembangan Balai Pembibitan Ternak;
- c. Mengkaji dan menganalisis perkembangan masing-masing ternak;
- d. Merencanakan operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan Balai Pembibitan Ternak;
- e. Melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program serta kegiatan Balai Pembibitan Ternak ;
- f. Mengkaji evaluasi dan menganalisa perkembangan masing-masing ternak;

- g. Melakukan seleksi dan recording terhadap ternak yang berkualitas untuk ternak bibit;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

## 2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang peningkatan derajat kesehatan hewan dan pelayanan teknis operasional Dinas Pusat Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Untuk melaksanakan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) menjalankan Fungsi :

- a. Membangun jejaring kerja dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam meningkatkan ketanggapan responsiveness terhadap ancaman dari penyakit hewan atau produk pangan asal hewan dan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan diwilayah kerjanya Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- b. Penanggung jawab yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesmavet dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan di Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- c. Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi dan informasi veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveillance dan pemetaan penyakit hewan, pengumpulan dan analisis data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM), pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologi dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;
- d. Melaksanakan penyehatan hewan melalui pembinaan, pelayanan kesehatan hewan dan penanganan penyakit reproduksi;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Melaksanakan fungsi epidemiologik veteriner dan Inseminasi Buatan (IB);
- g. Melakukan pemetaan penyakit hewan, informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- h. Melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pencegahan dan perlindungan penyakit hewan;
- j. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, produk asal hewan dan produk hewan non pangan;
- k. Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana puskeswan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

### 3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)

Mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Untuk melaksanakan tugas UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan pemotongan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) atau pemotongan yang Halal Aman Utuh dan Sehat (HAUS);
- b. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan, termasuk pengambilan sampel daging, organ-organ dan ikutannya untuk dilaksanakan uji kualitas laboratorium;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilaksanakan pemotongan (antermortem) termasuk pemeriksaan kebuntingan dan reproduksi;
- d. Melaksanakan pengawasan proses pemotongan dengan menerapkan prinsip higienis sanitasi serta memperhatikan kesejahteraan hewan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan karkas dan ikutannya setelah pemotongan (postmortem);
- f. Melakukan penolakan pemotongan hewan dan atau penolakan daging apabila benar-benar dijumpai hewan atau daging yang tidak sehat dan membahayakan untuk dikonsumsi;
- g. Memberikan legalitas formal bahwa daging layak konsumsi;
- h. Melaksanakan pengawasan proses pengangkutan daging dari rumah potong hewan sampai tempat penjualan;
- i. Memberikan jaminan ketentraman batin masyarakat bahwa pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;
- j. Melaksanakan pengolahan limbah Rumah Potong Hewan serta pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### 4. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang Pengetahuan dan keterampilan akan Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan menjalankan Fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis dalam mengembangkan Produksi Benih komoditi Perkebunan;
- b. Melaksanakan dan membina kegiatan Produksi Benih komoditi Perkebunan sekaligus dapat menjadi percontohan pembibitan yang baik dan benar pada lokasi yang telah ditentukan;
- c. Melaksanakan seluruh rangkaian proses pelabelan benih unggul yang dikembangkan;

- d. Mencari informasi baru tentang komoditi perkebunan yang unggul dan mengembangkan benih komoditi perkebunan yang bermutu tinggi;
- e. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- f. Menerapkan teknologi terkini dibidang pengembangan komoditi perkebunan sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
- g. Membentuk tenaga terampil dibidang Produksi Benih perkebunan;
- h. Melaksanakan Koordinasi secara kontinyu dengan instansi yang terkait dengan Pembibitan Perkebunan;
- i. Mengevaluasi setiap kegiatan Produksi Benih yang dilaksakan dan membuat pelaporan setelah pelaksanaan pembibitan selesai;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

#### 5. UPTD Kebun Binatang

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang Konservasi Taman Satwa dan pelayanan teknis operasional dinas di Kebun Binatang.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Kebun Binatang mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelestarian Binatang–binatang yang terdapat di Kebun Binatang;
- b. Menjaga Kesehatan Binatang Peliharaan dan menjaga agar habitatnya agar dapat berkembangbiak secara baik dan terpelihara;
- c. Memastikan bahwa Binatang Peliharaan terjaga kesehatannya dengan baik dan terpenuhinya akan kebutuhan makanan dengan cukup;
- d. Mewujudkan kebun binatang sebagai hutan kota dengan kekayaan aset taman satwa dan kemampuan konservasi yang tersertifikasi;
- e. Memperbaiki kualitas pengelolaan flora dan fauna mulai dari performance genetic potencial, envioment conditions, nutrient supply, dan management sehingga memenuhi syarat Kesejahteraan satwa;
- f. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sehingga memenuhi syarat kesejahteraan satwa dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau hutan kota;
- g. Pengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi pengadaan dan pendistribusian;
- h. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan kebun binatang;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

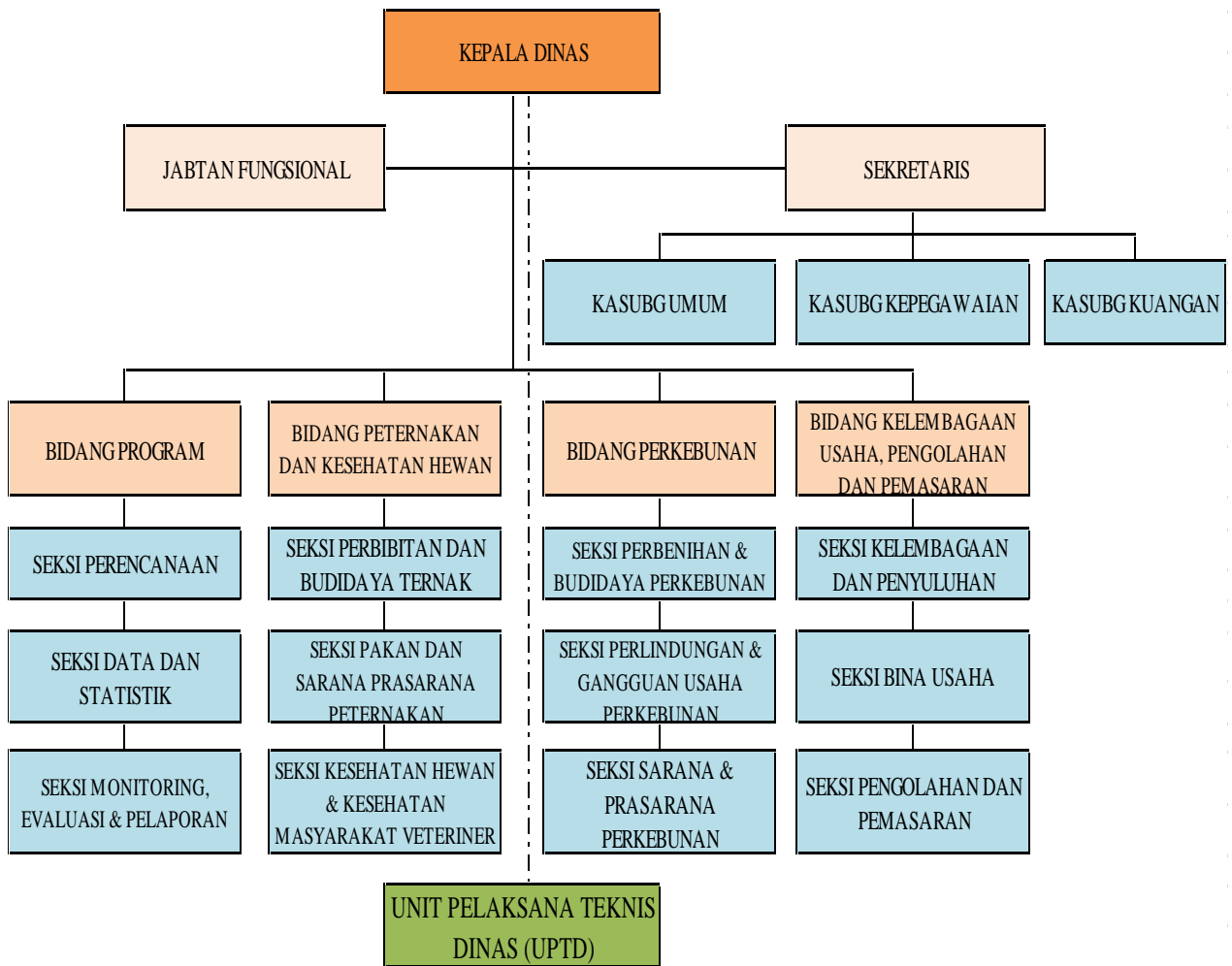
### C. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari tiga sub bagian, yaitu :
  - a. Sub bagian Umum
  - b. Sub bagian Kepegawaian
  - c. Sub bagian Keuangan
3. Bidang Program, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
  - a. Seksi Perencanaan
  - b. Seksi Data dan Statistik
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
  - a. Seksi Perbibitan dan Budi Daya Ternak
  - b. Seksi Pakan dan Sarana dan Prasarana Peternakan
  - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Bidang Perkebunan, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
  - a. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perkebunan
  - b. Seksi Perlindungan dan Gangguan Usaha Perkebunan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
6. Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
  - b. Seksi Bina Usaha
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
7. Jabatan Fungsional

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**BAGAN 1**  
**STRUKTUR ORGANISASIDINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan pada masa akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Peternakan dan Perkebunan saat ini pada April 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah (orang)	Total Per Golongan
1	I A	1	1
2	I B	0	
3	I C	0	
4	I D	0	
5	II A	3	17
6	II B	2	
7	II C	7	
8	II D	5	
9	III A	12	89
10	III B	20	
11	III C	23	
12	III D	34	
13	IV A	12	18
14	IV B	5	
15	IV C	1	
16	IV D	0	
	TOTAL	1256	125

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Eselon Tahun 2018

No	Jenis Eselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	II B	1	
2	III A	1	
3	III B	4	
4	IV A	28	
5	IV B	5	
	Jumlah	41	

Tabel 2.3. : Jumlah Kekuatan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Status Pegawai 2018

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1	Organik	125
2	Kontrak Kerja	75
3	Sukarelawan	0
	Jumlah	200

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No	Jenis Pendidikan	Golongan																Jumlah
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	SD	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	-	-	-	2	1	6	5	3	8	8	6	-	-	-	-	39
4	D II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	D III	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	10	-	-	-	-	18
6	D IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	1	-	57
8	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	12	14	2	1	-	-	57
	Jumlah	1	-	-	-	3	2	7	5	11	20	23	34	13	5	1	-	125

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan yang telah mengikuti Diklat Pim sampai Tahun 2016 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan 'Kabupaten Merangin Tahun 2018 Menurut Jabatan dan Tingkat Penjenjangan

No	Jabatan	Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan			Keterangan
		PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Kepala Dinas	1	1	1	
2	Sekretaris	-	1	1	
3	Kepala Bidang	-	-	4	
4	Kasubag/Kasi	-	-	10	
5	Staf	-	-	3	
	Jumlah	1	2	19	

### 2.2.2. Aset/Modal

Keberhasilan operasionalisasi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (aset) yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya lahan, gedung tempat kerja, sarana kerja, sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ;

Tabel 2.6. : Data Aset Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2018

No	Nama Aset	Jumlah
1.	Gedung/Bangunan	62 Unit
2.	Jalan/irigasi dan jaringan	22 paket
3.	Kendaraan bermotor Roda 4	5 Unit
4.	Kendaraan bermotor Roda 2	56 unit
5.	Kursi	43 Unit
6.	Meja	129 Unit
7.	Al Mari/Bufet/Filling/Lemari Obat/Rak	43 Unit
8.	Komputer/Laptop/Printer/Note Book/TV,Parabola/Power Sprayer/Mesin Tik/i-Pad	91 Unit
9.	AC/Kipas Angin	11 unit
9.	Mesin Rumput/Alat Pertanian/Alat Penggiling Hasil Pertanian/Pisau/Brankas/Fogging/Mesin perajang tembakau/Wireles/Hand Traktor/Genset/Hand Spayer/ gergaji Mesin/Pompa Air/LCD/papan Merk/Timbangan ternak/Infocus/Tongkat Ukur/Cointainer/Copper/Camera dan lain-lain	89 Unit
10	Aset tetap lainnya	1 Paket

### 2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sebagai Dinas Teknis dalam melaksanakan pembangunan selain memiliki sumberdaya yang tersebut diatas juga mempunyai usaha yang dikelola oleh dinas Berupa Pengelolaan Ternak Bibit Sapi dan Unit Pengelolaan Pupuk Organik yang terdapat di UPTD Balai Pembibitan Ternak di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat sudah berjalan kurang lebih tiga tahun.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1. Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Renstra 2014-2018

Berdasarkan indikator sasaran pada renstra 2014-2018 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Populasi Ternak Sapi (ekor)	16.808	14.418	14.514	16.611	15.709	16.808	15.431	16.836	16.764	16.686	17.136	107,03	116,00	106,72	99,27	101,95
2	Produksi Daging (Kg)	1.781.325,80	164.844,54	1.676.411,88	1.710.671,52	1.745.637,93	1.781.325,80	2.690.376	2.174.559	2.312.013	1.931.114	2.150.012	163,76	129,72	132,45	10,46	120,70
3	Produksi Telur (Kg)	611.475,46	492.659,01	519.705,97	546.724,92	577.922,32	611.475,46	560.318	560.782	535.107	621.385	616.913	113,73	107,90	92,59	101,62	100,89
4	Kelahiran Anak Sapi Hasil IB (Ekor)	850	650	700	750	800	850	943	925	955	350	933	145,08	132,14	119,38	41,18	109,77
5	Produktivitas Karet (Ton/Ha)	0,950	0,910	0,920	0,930	0,940	0,950	0,908	0,914	0,919	0,938	0,941	99,78	99,35	97,77	98,74	99,05
6	Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha)	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	3,822	4.438	4.481	4.253	4.253	93,22	105,67	101,84	94,51	94,51
7	Produktivitas Kopi (Ton/Ha)	1,55	1,10	1,20	1,30	1,45	1,55	1,02	1,02	1,03	1,13	1,223	92,73	85,00	71,03	72,90	78,90
8	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	102,50	98,27	100,69	101,00	102,32	102,50	98,27	100,69	99,75	99,10	99,05	100,00	100,00	97,49	96,68	96,63
9	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR)	100,00	97,52	98,27	98,89	99,32	100,00	97,52	98,27	98,89	105,19	96,94	100,00	100,00	99,57	105,19	96,94

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2014-2018 telah mengalami beberapa kali revaluasi sehingga terjadi perubahan indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.7. pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator populasi ternak sapi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dimana dari semua target populasi ternak sapi tahun 2014 sampai dengan 2018 terealisasi dengan sangat baik dengan nilai rata-rata diatas 99,27% sampai dengan 116,00%, dari jumlah populasi ternak sapi yang dicapai dibanding target provinsi dan pusat memang relatif kecil, tapi dibandingkan populasi ternak sapi dengan kabupaten lain di provinsi Jambi kita termasuk cukup baik, diurutkan ketiga se provinsi Jambi, keberhasilannya dikarenakan, angka kelahiran ternak sapi yang relatif tinggi, dan musibah bencana penyakit menular ternak sapi cukup mewabah tidak pernah terjadi, disamping itu minat dan animo masyarakat untuk memelihara ternak sapi juga cukup relatif tinggi, hal ini dikarenakan kondisi tanaman sawit masyarakat yang sudah tua dan sudah masanya untuk diremajakan.

Indikator produksi daging untuk renstra periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dari semua target yang telah ditetapkan telah mencapai target dengan realisasi tercapai dan melebihi dari target, capaian kinerja ini sangat baik, keberhasilan realisasi produksi daging ini disebabkan oleh tingginya permintaan daging dimasyarakat, dimana produksi daging didapat dari jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Merangin baik yang ada di Kabupaten Merangin maupun ternak yang didatangkan dari luar daerah Kabupaten Merangin untuk periode renstra tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dari produksi daging di Kabupaten bila dibandingkan produksi daging produksi dan pusat memang relatif kecil, namun bila dibandingkan kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi tidak terlalu jauh perbedaannya.

Untuk indikator produksi telur sama halnya dengan produksi daging dari target telah ditetapkan sudah terealisasi semuanya, dari target yang ditetapkan sudah terealisasi, hal ini dikarenakan tidak terjadinya kasus penyakit ternak unggas, khususnya penyakit AI tidak terjadi wabah yang relatif cukup besar selama periode tahun 2014 – 2018, selain itu juga terjadi peningkatan jumlah populasi ternak khususnya ternak ayam buras, sedangkan ternak itik di dua tahun terakhir periode renstra tahun 2014-2018 juga terjadi peningkatan populasi.

Indikator kelahiran anak sapi hasil IB selama periode renstra tahun 2014-2018 dari target ditetapkan rata-rata sudah mencapai target atau terealisasi, pada tahun 2017 indikator kelahiran anak sapi hasil IB tidak terealisasi dari target yang ditetapkan, target tahun 2017 sebesar 800 ekor dan realisasi sebesar 350 ekor atau sebesar 41,18%, hal dikarenakan ada perubahan sistem pelaporan hasil IB, dimana sebelum pelaporan melalui SMS, dan tahun 2014 sistem Nasional tersentral disatu tempat di pusat yang membutuhkan perangkat yang lebih canggih, sedangkan sarana dan prasarana di daerah belum tersedia dimana banyak kelahiran yang tidak dilaporkan, namun secara umum kelahiran hasil tahun 2017 juga terealisasi.

Untuk sub sektor perkebunan dengan indikator komoditi strategis unggulan perkebunan yaitu tanaman kelapa sawit, karet dan kopi. Produktifitas untuk tanaman kelapa sawit dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014-2018 dengan realisasi hampir 100% semuanya dengan rata-rata diatas 99,00%. Melihat dari target tersebut dengan capaian sangat berhasil, bila dibandingkan dengan target produktifitas kelapa sawit untuk provinsi dan pusat hampir relatif sama. Hal ini dikarenakan produksi dari tanaman kelapa sawit di Kabupaten Merangin memang relatif tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Indikator produktivitas tanaman karet dari target capaian yang ditetapkan untuk periode renstra tahun 2014-2018 rata-rata sudah terealisasi, dengan realisasi rata-rata diatas 99,00%. Bila dibandingkan dengan target provinsi dan pusat memang target produktivitas kabupaten Merangin lebih kecil, tapi tidak begitu jauh selisihnya. Keberhasilan ini dikarenakan program pemerintah provinsi dan pusat selama 10 tahun terakhir menggalakkan program pemerajaan karet dimana karet di remajakan dengan bibit yang berkualitas unggul, walaupun selama beberapa tahun terakhir harga karet memang anjlok.

Indikator produktivitas tanaman kopi selama periode tahun 2014-2018 dari target yang telah ditetapkan rata-rata dikatakan berhasil, realisasi sebesar rata-rata 80,52%. Walaupun realisasi tidak mencapai 100%, namun realisasi ini dikatakan berhasil, namun dibandingkan dengan target provinsi dan pusat, target kabupaten relatif lebih tinggi sedikit. Mungkin karena target terlalu ini yang menyebabkan tidak tercapai 100%.

Indikator untuk kesejahteraan petani periode renstra tahun 2014-2018, sub sektor peternakan dan perkebunan adalah nilai tukar petani peternakan, capaian kinerja untuk nilai tukar petani peternakan rata-rata sangat baik atau berhasil dengan nilai sebesar antara 96,68% sampai dengan 100,00%. Nilai tukar petani peternakan bila dibandingkan dengan target provinsi dan pusat relatif sama. Keberhasilan ini dikarenakan harga komoditi sub peternakan cenderung meningkat setiap sehingga harga yang diterima petani relatif tinggi.

Indikator nilai tukar petani perkebunan, capaian kinerja untuk nilai tukar petani perkebunan rata-rata sangat baik atau berhasil dengan nilai sebesar antara 99,57% sampai dengan 105,19%. Nilai tukar petani peternakan bila dibandingkan dengan target provinsi dan pusat relatif sama. Keberhasilan ini dikarenakan harga komoditi strategis sub perkebunan selama periode tahun 2014-2018 cenderung meningkat relatif kecil atau stabil, walaupun turun tidak begitu anjlok.

## 2.2.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Anggaran Renstra 2014-2018

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembangunan Peternakan dan Perkebunan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai goal yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada

masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat di atasi pada masa yang akan datang.

Capaian anggaran dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan tabel berikut :

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.278.717.000	3.755.631.000	3.954.804.534,67			3.454.395.212	3.673.120.998	3.932.826.000			1,05	0,98	0,99			6,62	4,47
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.646.918.800	7.372.307.710	6.131.984.880	-	-	5.539.106.276	7.254.218.892	5.632.638.152	-	-	0,98	0,98	0,92			4,58	2,87
<b>A Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	5.646.918.800	7.372.307.710	6.131.984.880	-	-	5.539.106.276	7.254.218.892	5.632.638.152	-	-	0,98	0,98	0,92			4,58	2,87
<b>I Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	180.130.000,0	82.890.000,0	222.015.000,0		-	170.450.000,0	82.817.000,0	219.405.000,0		-	0,95	1,00	0,99			37,95	37,84
1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Menular	40.000.000	71.740.000,0	174.775.000		-	37.500.000,0	71.667.000,0	174.615.000,0		-	0,94	1,00	1,00			74,32	78,25
2 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Ternak	14.980.000	11.150.000,0	-		-	7.800.000,0	11.150.000,0	-		-	0,52	1,00	-			(41,86)	(19,02)
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana PUSKESWAN	83.500.000	-	31.400.000		-	83.500.000,0	-	30.350.000,0		-	1,00	-	0,97			(33,33)	(33,33)
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies dan AI	41.650.000	-	15.840.000		-	41.650.000,0	-	14.440.000,0		-	1,00	-	0,91			(33,33)	(33,33)
<b>II Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	647.434.000,0	603.966.000,0	398.644.110,0		-	644.430.000,0	602.165.000,0	394.104.500,0		-	1,00	1,00	0,99			(13,57)	(13,70)
1 Peningkatan Saranan dan Prasarana UPTD Pembibitan	264.167.000	-	-		-	263.658.000,0	-	-		-	1,00	-	-			(33,33)	(33,33)
2 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	126.448.000	133.295.000,0	145.485.000		-	126.148.000,0	131.995.000,0	142.869.500,0		-	1,00	0,99	0,98			4,85	4,29
3 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak	42.000.000	270.410.000,0	253.159.110		-	41.650.000,0	270.209.000,0	251.235.000,0		-	0,99	1,00	0,99			179,15	180,58
4 Penggemukan Sapi/Penyediaan Stock Pangan Asal Ternak Pada Hari Raya	182.354.000	200.261.000,0	-		-	181.604.000,0	199.961.000,0	-		-	1,00	1,00	-			(30,06)	(29,96)
5 Pembekalan Kelompok Calon Penerima Ternak Pemerintah (Pendamping SAMISAKE)	32.465.000	-	-		-	31.370.000,0	-	-		-	0,97	-	-			(33,33)	(33,33)
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
<b>II Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	30.605.000,0	45.825.000,0	43.330.000,0		-	30.605.000,0	43.780.000,0	43.190.000,0		-	1,00	0,96	1,00			14,76	13,90
1 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	22.400.000	31.685.000,0	32.940.000		-	22.400.000,0	31.640.000,0	32.800.000,0		-	1,00	1,00	1,00			15,13	14,97
2 Lomba Kontes Ternak dan Lomba Kelompok Budidaya Perikanan	8.205.000	14.140.000,0	10.390.000		-	8.205.000,0	12.140.000,0	10.390.000,0		-	1,00	0,86	1,00			15,27	11,18
3 Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
4 Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
5 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan ,Pameran Agro Food Expo,HKP dan Jambi	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
<b>IV Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	378.465.000,0	31.760.000,0	68.580.000,0		-	352.310.000,0	63.520.000,0	66.780.000,0		-	0,93	2,00	0,97			8,10	(25,61)
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	95.285.000	31.760.000,0	68.580.000		-	69.600.000,0	31.760.000,0	66.780.000,0		-	0,73	1,00	0,97			16,42	18,63
2 Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (RPH) dan (RPH-U)	283.180.000	-	-		-	282.710.000,0	31.760.000	-		-	1,00	-	-			(33,33)	(62,92)



<b>V</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian</b>	-	<b>1.199.822.250,0</b>	<b>922.554.920,0</b>	-	-	-	<b>1.176.146.000,0</b>	<b>571.378.000,0</b>	-	-	-	<b>0,98</b>	<b>0,62</b>	-	-	<b>(7,70)</b>	<b>(17,14)</b>	
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak (DAK)	-	220.701.250,0	806.409.920,0	-	-	-	215.499.000,0	455.801.000,0	-	-	-	0,98	0,57	-	-	88,45	37,17	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (DAK)	-	774.631.000,0	116.145.000,0	-	-	-	757.257.000,0	115.577.000,0	-	-	-	0,98	1,00	-	-	(28,33)	(28,25)	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi RPH-Ruminansia (DAK)	-	204.490.000,0	-	-	-	-	203.390.000,0	-	-	-	-	0,99	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
<b>VI</b>	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>42.450.000,0</b>	<b>24.950.000,0</b>	<b>21.435.000,0</b>	-	-	-	<b>42.450.000,0</b>	<b>24.875.000,0</b>	<b>21.155.000,0</b>	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	-	-	<b>(18,43)</b>	<b>(18,79)</b>
1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	42.450.000,0	24.950.000	21.435.000	-	-	-	42.450.000,0	24.875.000,0	21.155.000,0	-	-	1,00	1,00	0,99	-	-	(18,43)	(18,79)
<b>VII</b>	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	-	<b>75.000.000,0</b>	-	-	-	-	<b>74.886.000,0</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>	-	-	-	-	<b>(33,33)</b>	<b>(33,33)</b>
1	Pengadaan akan dan obat-obatan satwa objek wisata	-	75.000.000	-	-	-	-	74.886.000,0	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
<b>VIII</b>	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	-	-	<b>64.549.000,0</b>	-	-	-	-	<b>62.999.000,0</b>	-	-	-	-	<b>0,98</b>	-	-	-	-	-
1	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	-	-	64.549.000	-	-	-	-	62.999.000,0	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Perikanan Budidaya</b>	<b>2.132.420.000,0</b>	<b>282.150.000,0</b>	<b>322.112.000,0</b>	-	-	-	<b>2.120.063.000,0</b>	<b>281.920.000,0</b>	<b>302.232.000,0</b>	-	-	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>	-	-	<b>(24,20)</b>	<b>(26,50)</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal	91.000.000	92.450.000	102.612.000	-	-	-	91.000.000	92.405.000	102.612.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	4,19	4,19
2	Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana BBI	448.000.000	-	-	-	-	-	446.600.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
3	Pembinaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	224.820.000	-	12.800.000	-	-	-	224.070.000	-	12.800.000	-	-	1,00	-	1,00	-	-	(33,33)	(33,33)
4	Pengembangan Budidaya Keramba	333.075.000	-	206.700.000	-	-	-	332.075.000	-	186.820.000	-	-	1,00	-	0,90	-	-	(33,33)	(33,33)
5	Pengembangan Budidaya Kolam	960.525.000	189.700.000	-	-	-	-	956.343.000	189.515.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	(60,08)	(60,06)
6	Inventarisasi Potensi Perikanan, Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	75.000.000	-	-	-	-	-	69.975.000	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
<b>X</b>	<b>Program Pengembangan Agribisnis Perikanan</b>	<b>79.450.000</b>	<b>402.950.000</b>	-	-	-	-	<b>79.450.000</b>	<b>385.361.000</b>	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	-	-	-	<b>102,39</b>	<b>95,01</b>
1	Sosialisasi Gemar Makan Ikan	79.450.000	402.950.000	-	-	-	-	79.450.000	385.361.000	-	-	-	1,00	0,96	-	-	-	102,39	95,01
<b>XI</b>	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>305.906.000</b>	-	-	-	-	-	<b>290.804.000</b>	-	-	-	-	<b>0,95</b>	-	-	-	-	<b>(33,33)</b>	<b>(33,33)</b>
1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Ikan Tradisional	305.906.000	-	-	-	-	-	290.804.000	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
<b>XII</b>	<b>Pengembangan Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan</b>	<b>46.786.000,0</b>	<b>5.250.000,0</b>	<b>27.000.000,0</b>	-	-	-	<b>46.786.000,0</b>	<b>5.250.000,0</b>	<b>25.000.000,0</b>	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,93</b>	-	-	<b>108,50</b>	<b>95,80</b>
1	Penyebaran Benih Ikan (Restocking) di Perairan Umum	46.786.000	5.250.000	27.000.000	-	-	-	46.786.000	5.250.000	25.000.000	-	-	1,00	1,00	0,93	-	-	108,50	95,80

<b>XII</b>	<b>Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	-	<b>2.750.715.400</b>	<b>2.131.328.000</b>	-	-	-	<b>2.674.419.000</b>	<b>2.115.038.000</b>	-	-	-	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>	-	-	<b>(7,50)</b>	<b>(6,97)</b>	
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Kewenangan Kab/Kota (DAK)	-	482.500.000	759.328.000	-	-	-	481.798.000	756.328.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	19,12	18,99	
2	Pengembangan Pembenihan Rakyat meliputi Kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan/atau Kelompok Hatchery Skala Rumah	-	112.915.400	-	-	-	-	110.920.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
3	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)	-	1.962.800.000	1.372.000.000	-	-	-	1.896.118.000	1.358.710.000	-	-	-	0,97	0,99	-	-	(10,03)	(9,45)	
4	Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran (DAK)	-	49.500.000	-	-	-	-	49.476.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
5	Pengadaan Sarana Public Awareness Campaign Pengawasan SDKP (DAK)	-	25.500.000	-	-	-	-	25.432.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
6	Penyediaan Sarana Penyuluh Perikanan (DAK)	-	117.500.000	-	-	-	-	110.675.000	-	-	-	-	0,94	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
7	Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu (DAK)	-	-	22.107.000	-	-	-	-	14.407.000	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	
<b>XIII</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>910.054.400,0</b>	<b>1.060.969.310,0</b>	<b>1.163.042.349,7</b>	-	-	<b>903.243.876,0</b>	<b>1.038.540.842,0</b>	<b>1.117.295.402,0</b>	-	-	-	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>0,96</b>	-	-	<b>8,73</b>	<b>7,52</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menurat	300.000	900.000	315.000	-	-	300.000	900.000	165.000	-	-	-	1,00	1,00	0,52	-	-	45,00	39,44
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000	83.199.000	70.800.000	-	-	57.741.960	64.443.602	66.629.011	-	-	-	0,93	0,77	0,94	-	-	6,14	4,99
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51.300.000	69.900.000	87.320.000	-	-	51.000.000	69.900.000	87.320.000	-	-	-	0,99	1,00	1,00	-	-	20,39	20,66
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.552.600	4.453.000	11.891.000	-	-	4.552.600	4.453.000	11.891.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	54,94	54,95
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.352.600	53.035.260	51.856.300	-	-	50.275.000	52.864.000	51.856.300	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,03	1,08
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.973.000	25.049.250	16.843.000	-	-	25.973.000	25.049.250	15.535.000	-	-	-	1,00	1,00	0,92	-	-	(12,10)	(13,85)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.186.200	10.052.800	7.157.000	-	-	8.186.200	10.050.800	7.157.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	2,00	(2,01)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	24.000.000	44.640.000	-	-	29.429.500	23.570.000	37.830.000	-	-	-	0,98	0,98	0,85	-	-	22,00	13,53
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.425.000	17.018.000	38.962.500	-	-	25.425.000	17.018.000	38.950.500	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	31,96	31,94
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	287.700.000	358.662.000	392.757.049,70	-	-	287.695.616	358.352.190	359.466.591	-	-	-	1,00	1,00	0,92	-	-	11,39	8,29
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	344.400.000	406.200.000	409.200.000	-	-	343.200.000	403.450.000	409.200.000	-	-	-	1,00	0,99	1,00	-	-	6,22	6,33
12	Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.465.000	8.500.000	31.300.500	-	-	19.465.000	8.490.000	31.295.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	70,63	70,74

XIV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	527.509.400,0	526.600.000,0	207.900.000,0	-	-	500.426.000,0	521.873.000,0	194.922.250,0	-	-	0,95	0,99	0,94	-	-	(20,23)	(19,46)
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	11.475.000	-	-	-	-	11.475.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	233.243.400	401.400.000	-	-	-	206.160.000	398.200.000	-	-	-	0,88	0,99	-	-	-	(9,30)	(2,28)
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.550.000	-	38.000.000	-	-	51.550.000	-	37.708.000	-	-	1,00	-	0,99	-	-	(33,33)	(33,33)
4	Pengadaan Meubeleir	36.950.000	38.400.000	79.500.000	-	-	36.950.000	38.282.000	69.518.250	-	-	1,00	1,00	0,87	-	-	36,98	28,40
5	Pengadaan Komputer	79.700.000	14.900.000	-	-	-	79.700.000	14.500.000	-	-	-	1,00	0,97	-	-	-	(60,43)	(60,60)
6	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	18.350.000	-	-	-	-	18.350.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	33,33	(33,33)
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.400.000	7.400.000	-	-	-	7.400.000	7.400.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.841.000	54.500.000	80.700.000	-	-	63.841.000	53.491.000	78.196.000	-	-	1,00	0,98	0,97	-	-	11,14	9,99
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	10.000.000	9.700.000	-	-	25.000.000	10.000.000	9.500.000	-	-	1,00	1,00	0,98	-	-	(21,00)	(21,66)
XV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	61.000.000,0	-	62.950.000,0	-	-	61.000.000,0	-	62.950.000,0	-	-	1,00	-	1,00	-	-	(33,33)	(33,33)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	61.000.000	-	62.950.000	-	-	61.000.000	-	62.950.000	-	-	1,00	-	1,00	-	-	(33,33)	(33,33)
XVI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.500.000,0	9.500.000,0	15.000.000,0	-	-	12.950.000,0	9.500.000,0	15.000.000,0	-	-	0,60	1,00	1,00	-	-	0,69	10,42
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	21.500.000	9.500.000	15.000.000	-	-	12.950.000	9.500.000	15.000.000	-	-	0,60	1,00	1,00	-	-	0,69	10,42
XVII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	266.586.000,0	33.973.750,0	54.081.000,0	-	-	267.515.400,0	33.961.750,0	31.031.000,0	-	-	1,00	1,00	0,57	-	-	9,06	(31,98)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	9.804.000	6.154.250	7.880.000	-	-	9.804.000	6.154.250	7.880.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	(3,06)	(3,06)
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	8.525.000	8.000.000	-	-	-	8.525.000	8.000.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	(2,05)	(2,05)
3	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	14.012.500	-	0	-	-	14.012.500	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	9.223.000	8.022.000	-	-	-	9.223.000	8.022.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	(4,34)	(4,34)
5	Penyusunan Laporan Tahunan	-	10.071.500	7.129.000	-	-	7.880.000	10.059.500	7.129.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	(9,73)	(0,49)
6	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	24.114.000	-	-	-	-	24.114.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	-
7	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	7.523.500	-	-	-	-	7.523.500	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	-
8	Penyusunan Data Statistik SKPD	75.776.500	-	-	-	-	75.776.500	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	-
9	Inventarisasi Potensi Peternakan dan Akseptor Ternak Pemerintah	63.614.500	-	-	-	-	56.830.500	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	(33,33)	-
10	Penyusunan Produk Hukum Peternakan dan Perikanan	48.138.000	-	-	-	-	47.971.400	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	-
11	Penatausahaan dan penyusunan laporan aset SKPD	23.603.000	-	23.050.000	-	-	23.603.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
XVIII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	-	95.405.000	218.691.000	-	-	-	95.305.000	218.251.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	43,07	43,00
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	-	7.849.000	5.830.000	-	-	-	7.849.000	5.830.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	(8,57)	(8,57)
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	-	87.556.000	212.861.000	-	-	-	87.456.000	212.421.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	47,70	47,63
XIX	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	16.623.000,0	44.005.000,0	88.492.500,0	-	-	16.623.000,0	43.948.000,0	81.873.000,0	-	-	1,00	1,00	0,93	-	-	88,60	83,56
	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	16.623.000	-	-	-	-	16.623.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas	-	44.005.000	88.492.500	-	-	-	43.948.000	81.873.000	-	-	-	1,00	0,93	-	-	33,69	28,77
XX	Program Pengembangan data/Informasi/ Statistik daerah	-	96.576.000,0	100.280.000,0	-	-	-	95.951.300,0	90.034.000,0	-	-	-	0,99	0,90	-	-	1,27	(2,06)
	Pengelolaan dan Penyusunan statistik peternakan / perikanan	-	96.576.000	100.280.000	-	-	-	95.951.300	90.034.000	-	-	-	0,99	0,90	-	-	1,27	(2,06)
	<b>JUMLAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b>	<b>8.925.635.800,0</b>	<b>11.127.938.710,0</b>	<b>10.086.789.414,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.993.501.488,0</b>	<b>10.927.339.890,0</b>	<b>9.565.464.152,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,98</b>	<b>0,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,10</b>	<b>3,01</b>

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>A BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.439.220.000</b>	<b>6.240.853.000</b>	<b>5.732.782.019,23</b>			<b>5.579.990.972</b>	<b>6.129.890.680</b>	<b>4.867.169.804</b>			<b>1,03</b>	<b>0,98</b>	<b>0,85</b>	-	-	<b>6,60</b>	<b>-3,58</b>
<b>B BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.724.385.509</b>	<b>9.506.933.845</b>	<b>5.560.507.019</b>	-	-	<b>11.698.362.759</b>	<b>8.998.072.613</b>	<b>4.849.433.054</b>			<b>0,92</b>	<b>0,95</b>	<b>0,87</b>	-	-	<b>-22,27</b>	<b>(23,06)</b>
<b>Dinas Perkebunan dan Kehutanan</b>	<b>12.724.385.509</b>	<b>9.506.933.845</b>	<b>5.560.507.019</b>	-	-	<b>11.698.362.759</b>	<b>8.998.072.613</b>	<b>4.849.433.054</b>			<b>0,92</b>	<b>0,95</b>	<b>0,87</b>	-	-	<b>-22,27</b>	<b>(23,06)</b>
<b>I Program Pelayanan Administrasi</b>	<b>1.088.338.000</b>	<b>979.883.345</b>	<b>1.614.743.251</b>	-	-	<b>1.076.077.700</b>	<b>932.038.340</b>	<b>1.574.319.354</b>			<b>0,99</b>	<b>0,95</b>	<b>0,97</b>	-	-	<b>18,51</b>	<b>18,51</b>
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	500.000	-	-	4.200.000	2.720.000	500.000			1,00	0,65	1,00	-	-	-29,37	(38,95)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	50.980.000	81.000.000	89.000.000	-	-	48.480.000	51.365.640	58.812.703			0,95	0,63	0,66	-	-	22,92	6,82
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	27.050.000	16.200.000	7.705.400	-	-	17.634.200	14.712.800	7.371.800			0,65	0,91	0,96	-	-	-30,85	(22,15)
4 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	110.700.000	93.600.000	76.000.000	-	-	110.700.000	93.600.000	76.000.000			1,00	1,00	1,00	-	-	-11,42	(11,42)
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.388.000	9.800.000	3.430.000	-	-	7.388.000	9.800.000	3.430.000			-	1,00	-	-	-	-10,78	(10,78)
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	35.204.100	20.449.900	-	-	34.655.500	35.204.100	20.449.900			-	1,00	1,00	-	-	-13,78	(13,44)
7 Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	51.000.000	14.072.900	11.157.450	-	-	51.000.000	14.072.900	11.157.450			-	-	-	-	-	-31,04	(31,04)
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.420.000	6.855.000	4.496.000	-	-	7.420.000	6.855.000	4.496.000			1,00	1,00	1,00	-	-	-14,01	(14,01)
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.000.000	53.000.000	34.000.000	-	-	44.000.000	53.000.000	34.000.000			1,00	-	-	-	-	-5,13	(5,13)
10 Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	28.555.000	15.255.000	-	-	40.000.000	28.555.000	15.255.000			1,00	1,00	1,00	-	-	-25,06	(25,06)
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	350.000.000	294.716.345	1.030.874.501	-	-	350.000.000	293.267.900	1.030.846.501			1,00	1,00	1,00	-	-	78,00	78,43
12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	333.600.000	308.500.000	312.000.000	-	-	333.600.000	303.900.000	312.000.000			1,00	-	-	-	-	-2,13	(2,08)
13 Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000	25.000.000	9.875.000	-	-	27.000.000	24.985.000	-			1,00	1,00	-	-	-	-22,64	(35,82)
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	-	9.180.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	0,00	-
<b>II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>678.950.000</b>	<b>803.850.000</b>	<b>145.823.500</b>	-	-	<b>663.359.700</b>	<b>592.255.000</b>	<b>296.724.050</b>			<b>0,98</b>	<b>0,74</b>	-	-	-	<b>(38,40)</b>	<b>(38,43)</b>
1 Pembangunan Gedung Kantor	-	390.000.000	-	-	-	-	386.445.000	-			-	0,99	-	-	-	-33,33	-33,33
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	289.400.000	200.150.000	-	-	-	282.550.000	-	200.150.000			0,98	-	-	-	-	-43,61	33,33
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61.150.000	27.650.000	18.000.000	-	-	55.252.600	27.000.000	-			0,90	0,98	-	-	-	-29,89	-50,38
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000			-	-	1,00	-	-	0	0
5 Pengadaan Komputer	110.300.000	43.900.000	18.000.000	-	-	109.716.100	41.940.000	17.996.000			0,99	0,96	1,00	-	-	-38,73	-39,62
6 Pengadaan alat studio dan komunikasi	-	23.000.000	-	-	-	-	18.000.000	-			-	0,78	-	-	-	-33,33	-33,33
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung	25.500.000	10.350.000	41.300.000	-	-	25.250.000	10.350.000	11.300.000			0,99	1,00	0,27	-	-	79,87	-16,61
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend.Dinas/Operasional	123.000.000	95.000.000	46.213.500	-	-	122.991.000	94.720.000	45.233.050			1,00	1,00	0,98	-	-	-24,71	-25,08
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.800.000	13.800.000	12.310.000	-	-	40.800.000	13.800.000	12.045.000			1,00	1,00	0,98	-	-	-25,66	-26,30
10 Rehab Sedang/Berat rumah gedung Kantor	28.800.000	-	-	-	-	26.800.000	-	-			0,93	-	-	-	-	-33,33	-33,33

<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>107.510.000</b>	<b>53.160.000</b>	<b>54.275.000</b>	-	-	<b>107.031.150</b>	<b>53.124.000</b>	<b>54.244.000</b>	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	<b>-16,15</b>	<b>(16,09)</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	107.510.000	53.160.000	54.275.000	-	-	107.031.150	53.124.000	54.244.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-16,15	-16,15
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>141.500.000</b>	<b>37.980.000</b>	<b>14.425.000</b>	-	-	<b>141.466.000</b>	<b>37.980.000</b>	<b>14.425.000</b>	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	<b>-45,06</b>	<b>(45,06)</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	141.500.000	37.980.000	14.425.000	-	-	141.466.000	37.980.000	14.425.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-45,06	-45,06
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>314.202.385</b>	<b>118.417.899</b>	<b>59.918.400</b>	-	-	<b>308.202.385</b>	<b>118.417.899</b>	<b>59.611.400</b>	-	-	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	-	-	<b>(37,24)</b>	<b>(37,08)</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	67.182.899	29.533.400	-	-	-	67.182.899	29.533.400	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-18,68	-18,68
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	-	8.680.000	8.280.000	-	-	-	8.680.000	7.973.000	-	-	-	1,00	0,96	-	-	-1,54	2,72
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir	-	10.095.000	10.095.000	-	-	-	10.095.000	10.095.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Kinerja SKPD	120.300.385	-	-	-	-	119.300.385	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-33,33	-33,33
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	21.775.000	-	-	-	-	21.775.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33
6	Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33
7	Penyusunan Statistik Perkebunan	82.127.000	-	-	-	-	82.127.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33
8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	-	-	-	-	55.000.000	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-33,33	-33,33
9	Penatausahaan dan penyusunan laporan as	-	32.460.000	12.010.000	-	-	-	32.460.000	12.010.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-21,00	-21,00
<b>VI</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000</b>	<b>23.662.067</b>	-	-	<b>-</b>	<b>30.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	-	-	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	-	-	<b>-7,04</b>	<b>(7,22)</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	-	30.000.000	23.662.067	-	-	-	30.000.000	23.500.000	-	-	-	1,00	0,99	-	-	-7,04	-7,22
<b>VII</b>	<b>Program Visualisasi Hasil Pembangunan</b>	<b>-</b>	<b>32.890.000</b>	<b>52.800.000</b>	-	-	<b>-</b>	<b>32.889.050</b>	<b>37.070.000</b>	-	-	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	-	-	<b>20,18</b>	<b>4,24</b>
1	Penyebarluasan Informasi Hasil	-	32.890.000	52.800.000	-	-	-	32.889.050	37.070.000	-	-	-	1,00	0,70	-	-	20,18	4,24
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah</b>	<b>-</b>	<b>66.000.000</b>	<b>48.950.000</b>	-	-	<b>-</b>	<b>64.941.600</b>	<b>48.950.000</b>	-	-	<b>-</b>	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>	-	-	<b>-8,61</b>	<b>(8,21)</b>
1	Pengelolaan dan penyusunan statistik perkebunan	-	66.000.000	48.950.000	-	-	-	64.941.600	48.950.000	-	-	-	0,98	1,00	-	-	-8,61	-8,61
<b>IX</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>12.881.500</b>	-	-	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>12.781.500</b>	-	-	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	-	-	<b>-24,75</b>	<b>(24,81)</b>
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	50.000.000	12.881.500	-	-	-	50.000.000	12.781.500	-	-	-	1,00	0,99	-	-	-24,75	-24,75
<b>X</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan</b>	<b>264.200.000</b>	<b>159.500.000</b>	<b>53.360.000</b>	-	-	<b>263.558.090</b>	<b>159.500.000</b>	<b>53.360.000</b>	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	<b>(35,39)</b>	<b>(34,34)</b>
1	Pengembangan hasil hutan non kayu	60.000.000	36.500.000	15.275.000	-	-	60.000.000	36.500.000	15.275.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-32,44	-32,44
2	Optimalisasi PNPB	125.000.000	80.000.000	16.110.000	-	-	124.889.090	80.000.000	16.110.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-38,53	-38,53
3	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	79.200.000	43.000.000	21.975.000	-	-	78.669.000	43.000.000	21.975.000	-	-	0,99	1,00	1,00	-	-	-31,53	-31,53

XI	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.975.164.772	2.826.326.250	1.639.469.000	-	-	2.097.820.150	2.649.284.550	1.399.034.000	-	-	0,71	0,94	0,85	-	-	(15,57)	(6,97)
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	133.372.772	-	-	-	-	129.709.750	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-33,33	-33,33
2	Rehabilitasi dan lahan (DAK Kehutanan Luncuran 2013)	762.330.000	500.000.000	-	-	-	-	483.954.000	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-44,80	-33,33
3	Pendukung DAK Kehutanan	165.000.000	-	-	-	-	161.950.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-33,33	-33,33
4	Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan (DAK Kehutanan Murni 2014)	1.914.462.000	-	-	-	-	1.806.160.400	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-33,33	-33,33
5	Pendukung pembangunan Hutan Rakyat dan pengayaan (DAK)	-	53.669.250	633.000.000	-	-	-	53.669.250	631.468.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	359,82	359,82
6	Pengembangan Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan (DAK)	-	135.000.000	85.809.000	-	-	-	106.743.000	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-12,15	-12,15
7	Pengembangan Sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK)	-	449.000.000	522.000.000	-	-	-	442.440.000	452.182.000	-	-	-	0,99	0,87	-	-	5,42	5,42
8	Pengembangan Sarana dan prasarana KPH	-	376.327.000	185.000.000	-	-	-	324.555.000	139.750.000	-	-	-	0,86	0,76	-	-	-16,95	-16,95
9	Rehabilitasi Hutan (DAK Kehutanan)	-	262.330.000	-	-	-	-	202.278.300	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-33,33	-33,33
10	Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil hutan	-	-	194.930.000	-	-	-	-	156.904.000	-	-	-	-	0,80	-	-	0,00	0,00
11	Pembangunan Hutan Rakyat dan Pengayaan	-	1.050.000.000	18.730.000	-	-	-	1.035.645.000	18.730.000	-	-	-	0,99	1,00	-	-	-32,74	-32,74
<b>XII</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>	<b>352.500.000</b>	<b>284.640.000</b>	<b>46.110.000</b>	-	-	<b>352.500.000</b>	<b>284.640.000</b>	<b>45.235.000</b>	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>	-	-	<b>(34,35)</b>	<b>(34,45)</b>
1	Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	252.500.000	192.000.000	27.375.000	-	-	252.500.000	192.000.000	26.500.000	-	-	1,00	1,00	0,97	-	-	-36,57	-36,57
2	Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Desa Renah Kemumu dan Desa Tj. Kasri	100.000.000	53.000.000	11.550.000	-	-	100.000.000	53.000.000	11.550.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-41,74	-41,74
3	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	39.640.000	7.185.000	-	-	-	39.640.000	7.185.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-27,29	-27,29
<b>XIII</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	-	-	-	<b>59.500.000</b>	-	-	-	-	<b>0,85</b>	-	-	-	-	<b>-40,95</b>	<b>-33,33</b>
1	Pengawasan dan Pembinaan industri Hasil Hutan	70.000.000	54.000.000	-	-	-	59.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,95	-33,33
<b>XIV</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>	<b>1.060.500.000</b>	<b>553.610.000</b>	<b>145.731.000</b>	-	-	<b>1.046.981.969</b>	<b>611.383.150</b>	<b>127.994.250</b>	-	-	<b>0,99</b>	<b>1,10</b>	<b>0,88</b>	-	-	<b>-40,49</b>	<b>-40,22</b>
1	Pendamping Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat	40.000.000	-	-	-	-	39.979.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33
2	Pengembangan Hutan Desa	110.255.000	62.120.000	13.065.000	-	-	110.255.000	62.110.000	13.065.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-40,88	-40,88
3	Pembinaan Hutan Desa	50.000.000	40.200.000	8.050.000	-	-	50.000.000	40.200.000	8.050.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-33,19	-33,19
4	Penataan Areal Kerja Calon Peserta HTR	222.320.000	45.575.000	32.462.000	-	-	222.320.000	112.560.000	32.462.000	-	-	1,00	2,47	1,00	-	-	-36,09	-40,18
5	Pemutakhiran data geospasial sumberdaya hutan	79.510.000	49.460.000	10.225.000	-	-	78.260.000	45.565.000	10.225.000	-	-	0,98	0,92	1,00	-	-	-39,04	-39,78
6	Pengembangan Hutan Adat Pembinaan izin pemanfaatan hutan	105.490.000	24.100.000	-	-	-	105.490.000	24.100.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-59,05	-59,05
7	Pengembangan KPHP	200.000.000	130.000.000	-	-	-	190.121.969	124.830.150	-	-	-	0,95	0,96	-	-	-	-45	-44,78
8	Pembinaan izin penggunaan kawasan hutan	52.925.000	32.695.000	8.250.000	-	-	52.925.000	32.690.000	8.250.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-37,66	-37,67
9	Pembinaan Hutan Adat	200.000.000	70.000.000	17.736.750	-	-	197.631.000	69.998.000	-	-	-	0,99	1,00	-	-	-	-46,55	-54,86
10	Pengembangan Hutan Adat	-	49.460.000	8.350.000	-	-	-	49.330.000	8.350.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-27,71	-27,69
11	Pembinaan Kelompok Tani HTR	-	50.000.000	7.775.000	-	-	-	50.000.000	7.775.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-28,15	-28,15
12	Pembinaan izin pemanfaatan hutan	-	-	4.575.000	-	-	-	-	4.575.000	-	-	-	-	1,00	-	-	0,00	0,00
13	Operasional KPHP	-	-	35.242.250	-	-	-	-	35.242.250	-	-	-	-	1,00	-	-	0,00	0,00

<b>XV</b>	<b>Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>19.250.000</b>	-	-	<b>59.500.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>19.250.000</b>	-	-	<b>0,85</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	<b>-29,07</b>	<b>-24,53</b>
1	Pengawasan dan Pembinaan Industri hasil hutan	70.000.000	54.000.000	19.250.000	-	-	59.500.000	54.000.000	19.250.000	-	-	0,85	1,00	1,00	-	-	-29,07	-24,53
<b>XVI</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>312.588.000</b>	<b>265.138.000</b>	<b>58.304.000</b>	-	-	<b>285.263.000</b>	<b>258.510.600</b>	<b>58.304.000</b>	-	-	<b>0,91</b>	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>	-	-	<b>-31,06</b>	<b>-28,94</b>
1	Pembinaan UPPT	109.431.000	108.431.000	19.731.000	-	-	82.431.000	108.361.000	19.731.000	-	-	0,75	1,00	1,00	-	-	-27,57	-16,78
2	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	100.707.000	80.707.000	17.323.000	-	-	100.412.000	74.167.600	17.323.000	-	-	1,00	0,92	1,00	-	-	-32,8	-34,26
3	Pengendalian kebakaran lahan dan kebun dan sosialisasi PLTB	102.450.000	76.000.000	21.250.000	-	-	102.420.000	75.982.000	21.250.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-32,62	-32,62
<b>XVII</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan</b>	<b>2.115.960.015</b>	<b>291.827.000</b>	<b>405.483.000</b>	-	-	<b>2.096.928.815</b>	<b>263.395.050</b>	<b>363.333.000</b>	-	-	<b>0,99</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	-	-	<b>-15,75</b>	<b>-16,5</b>
1	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Perkebunan	90.000.000	71.000.000	16.950.000	-	-	90.000.000	71.000.000	16.950.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-32,41	-32,41
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	2.025.960.015	206.967.000	377.533.000	-	-	2.006.928.815	178.535.050	335.383.000	-	-	0,99	0,86	0,89	-	-	-2,46	-1,08
3	Pameran bidang pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten	-	5.360.000	-	-	-	5.360.000	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
4	Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas	-	8.500.000	11.000.000	-	-	-	8.500.000	11.000.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	9,80	9,80
<b>XVIII</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	<b>1.944.734.500</b>	<b>941.895.300</b>	<b>667.017.500</b>	-	-	<b>1.931.818.000</b>	<b>938.650.300</b>	<b>661.297.500</b>	-	-	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	-	-	<b>-26,92</b>	<b>-26,99</b>
1	Pendamping pengembangan karet rakyat dan pengembangan kopi	219.375.000	76.100.000	13.250.000	-	-	216.375.000	76.100.000	13.250.000	-	-	0,99	1,00	1,00	-	-	-49,3	-49,14
2	Pembibitan Kelapa Sawit	891.957.800	427.645.300	348.425.000	-	-	886.387.050	425.081.300	346.868.000	-	-	0,99	0,99	1,00	-	-	-23,53	-23,48
3	Penataan pembibitan Tj. Lamin	394.129.200	-	-	-	-	390.611.450	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-33,33	-33,33
4	Pemeliharaan Lanj.Pembibitan Kelapa Sawit	74.082.500	90.750.000	53.612.500	-	-	74.082.500	90.725.000	52.442.500	-	-	1,00	1,00	0,98	-	-	-6,14	-6,58
5	Optimalisasi kegiatan P2WKSS dan BBGRM	25.000.000	30.000.000	22.475.000	-	-	25.000.000	29.645.000	22.402.000	-	-	1,00	0,99	1,00	-	-	-1,69	-1,95
6	Pemeliharaan Kebun Pemerintah	152.040.000	96.800.000	85.250.000	-	-	151.990.000	96.648.000	85.200.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-16,09	-16,09
7	Pembinaan kelompok penerima prasarana perkebunan	47.000.000	40.750.000	57.750.000	-	-	47.000.000	40.650.000	54.880.000	-	-	1,00	1,00	0,95	-	-	9,47	7,17
8	Pembangunan prasarana dan sarana perbenihan /pembibitan tan. Perkebunan	141.150.000	-	-	-	-	140.372.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-33,33	-33,33
9	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	-	55.575.000	12.750.000	-	-	-	55.575.000	12.750.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-25,69	-25,69
10	Fasilitasi dan pembinaan replanting sawit	-	34.475.000	9.875.000	-	-	-	34.475.000	9.875.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-23,79	-23,79
11	Pengelolaan dan Pembibitan Karet	-	55.800.000	-	-	-	-	55.755.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
12	Peningkatan Mutu Kopi	-	34.000.000	63.630.000	-	-	-	33.996.000	63.630.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	29,05	29,06

<b>XIX</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	-	-	-	<b>245.350.000</b>	<b>113.510.000</b>	-	-	-	<b>0,98</b>	<b>0,95</b>	-	-	-	<b>-50,67</b>	<b>-51,25</b>
1	Operasional UPTD	250.000.000		-	-	-	245.350.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-33,33	-33,33
2	Operasional UPTD Wilayah 1	-	15.000.000	-	-	-	-	8.845.000	-	-	-	-	0,59	-	-	-	-33,33	-33,33
3	Operasional UPTD Wilayah 2	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
4	Operasional UPTD Wilayah 3	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
5	Operasional UPTD Wilayah 5	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
6	Operasional UPTD Wilayah 6	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
7	Operasional UPTD Wilayah 7	-	15.000.000	-	-	-	-	14.970.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
8	Operasional UPTD Wilayah 8	-	15.000.000	-	-	-	-	14.835.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-33,33	-33,33
9	Operasional UPTD Wilayah 9	-	15.000.000	-	-	-	-	14.860.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-33,33	-33,33
<b>XX</b>	<b>Program Penyebaran Informasi Pembangunan</b>	<b>105.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33,33</b>	<b>-33,33</b>
1	Pawai dan Pameran Pembangunan dan Expo	105.000.000		-	-	-	105.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33
<b>XXI</b>	<b>Program Peningkatan Usaha Perkebunan</b>	<b>225.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33,33</b>	<b>-33,33</b>
1	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	64.600.000		-	-	-	64.600.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33
2	Replanting Sawit	160.400.000		-	-	-	157.400.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-33,33	-33,33
<b>XXII</b>	<b>Program Pengembangan dan Penataan Aset</b>	<b>18.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33,33</b>	<b>-33,33</b>
1	Penataan Aset	18.200.000		-	-	-	15.700.000	-	-	-	-	0,86	-	-	-	-	-33,33	-33,33
<b>XXIII</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian</b>	<b>-</b>	<b>1.285.512.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.278.974.474</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33,33</b>	<b>-33,33</b>
1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan	-	1.285.512.250	-	-	-	-	1.278.974.474	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-33,33	-33,33
<b>XXIV</b>	<b>Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku</b>	<b>480.037.837</b>	<b>498.303.801</b>	<b>498.303.801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>471.189.800</b>	<b>474.578.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,98</b>	<b>0,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,09</b>
1	Pembinaan kelompok tani tembakau dalam penanganan panen dan pasca panen tembakau	480.037.837	498.303.801	498.303.801	-	-	471.189.800	474.578.600	-	-	-	0,98	0,95	-	-	-	1,27	0,24
<b>XXV</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149.116.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33,33</b>	<b>-33,33</b>
1	Penyusunan data base perkebunan dan kehutanan	150.000.000		-	-	-	149.116.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-33,33	-33,33
	<b>JUMLAH DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>	<b>18.163.605.509</b>	<b>15.747.786.845</b>	<b>11.293.289.038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.278.353.731</b>	<b>15.127.963.293</b>	<b>9.716.602.858</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>	<b>0,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4,43</b>	<b>-4,15</b>



Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2017-2018

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	-	-	-	8.529.132.946,01	7.582.132.946,01	-	-	-	8.277.699.156,00	-	-	-	-	0,97	-	-11,10	-
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	-	-	-	4.797.317.523,60	5.225.694.421,00	-	-	-	4.734.911.920,00	-	-	-	-	0,99	-	8,93	-
<b>A Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>	-	-	-	4.797.317.523,60	5.225.694.421,00	-	-	-	4.734.911.920,00	-	-	-	-	0,99	-	8,93	-
<b>I Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	-	-	-	123.195.000,00	84.616.000,00	-	-	-	122.912.000,00	-	-	-	-	1,00	-	(31,32)	-
1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Menular	-	-	-	86.760.000,00	73.500.000,00	-	-	-	86.568.000,00	-	-	-	-	1,00	-	(15,28)	-
2 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana PUSKESWAN	-	-	-	26.100.000,00	11.116.000,00	-	-	-	26.029.000,00	-	-	-	-	1,00	-	57,41	-
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies dan AI	-	-	-	10.335.000,00	-	-	-	-	10.315.000,00	-	-	-	-	1,00	-	(100,00)	-
<b>II Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	-	-	-	1.333.825.000,00	2.152.334.500,00	-	-	-	1.332.153.500,00	-	-	-	-	1,00	-	61,37	-
1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	-	-	-	487.135.000,00	1.367.250.000,00	-	-	-	486.617.000,00	-	-	-	-	1,00	-	180,67	-
2 Penggemukan sapi/ penyediaan stock pangan asal ternak	-	-	-	80.742.500,00	233.000.000,00	-	-	-	80.583.000,00	-	-	-	-	-	-	188,57	-
3 Pengembangan Pakan Ternak	-	-	-	149.547.500,00	518.404.500,00	-	-	-	149.258.500,00	-	-	-	-	1,00	-	246,65	-
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	-	-	-	616.400.000,00	33.680.000,00	-	-	-	615.695.000,00	-	-	-	-	1,00	-	(94,54)	-
<b>III Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	-	-	-	189.920.000,00	124.700.000,00	-	-	-	181.617.500,00	-	-	-	-	0,96	-	(34,34)	-
1 Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan	-	-	-	10.870.000,00	-	-	-	-	10.870.000,00	-	-	-	-	1,00	-	(100,00)	-
2 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	23.600.000,00	-	-	-	-	22.985.000,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)	-
3 Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	-	-	-	19.500.000,00	124.700.000,00	-	-	-	19.432.500,00	-	-	-	-	1,00	-	539	-
4 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan ,Pameran Agro Food Expo,HKP dan Jambi Tuntas	-	-	-	135.950.000,00	-	-	-	-	128.330.000,00	-	-	-	-	0,94	-	(100)	-
5 Lomba Kontes Ternak dan Kelompok Pembudidaya Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	-	-	-	<b>43.132.500,0</b>	-	-	-	-	<b>42.797.500,0</b>	-	-	-	-	<b>0,99</b>	<b>(100,00)</b>	-
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	-	-	-	43.132.500,00	-	-	-	-	42.797.500,00	-	-	-	-	0,99	(100,00)	-
<b>V</b>	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan</b>	-	-	-	<b>20.850.000,0</b>	-	-	-	-	<b>20.850.000,0</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>(100,00)</b>	-
1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	-	-	-	20.850.000,00	-	-	-	-	20.850.000,00	-	-	-	-	1,00	(100,00)	-
<b>VI</b>	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	-	-	-	<b>83.040.000,0</b>	-	-	-	-	<b>83.040.000,0</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>(100,00)</b>	-
1	Pengadaan akan dan obat-obatan satwa objek wisata	-	-	-	83.040.000,00	-	-	-	-	83.040.000,00	-	-	-	-	1,00	(100,00)	-
<b>VII</b>	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	-	-	-	<b>110.655.000,0</b>	<b>36.325.000,0</b>	-	-	-	<b>95.244.000,0</b>	-	-	-	-	<b>0,86</b>	<b>(67,17)</b>	-
1	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	-	-	-	66.350.000,00	-	-	-	-	61.394.000,00	-	-	-	-	0,93	(100,00)	-
1	Pembinaan UPPT	-	-	-	15.900.000,00	-	-	-	-	14.795.000,00	-	-	-	-	0,93	(100,00)	-
2	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	-	-	-	13.825.000,00	-	-	-	-	11.725.000,00	-	-	-	-	0,85	(100,00)	-
3	Pengendalian kebakaran lahan dan kebun dan sosialisasi PLTB	-	-	-	14.580.000,00	-	-	-	-	7.330.000,00	-	-	-	-	0,50	(100,00)	-
4	Penilaian kelompok tani, petani berprestasi dan gapoktan dan UPTB terbaik oleh tim penilai tingkat Kabupaten	-	-	-	-	36.325.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-
<b>VIII</b>	<b>Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan</b>	-	-	-	-	<b>401.185.000,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-
1	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Perkebunan	-	-	-	-	15.200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan	-	-	-	-	290.895.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-
3	Pameran bidang pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,00)	-
4	Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	-	-	-	-	95.090.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-
<b>IX</b>	<b>Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	-	-	-	<b>622.537.500</b>	<b>216.729.500</b>	-	-	-	<b>617.614.850</b>	-	-	-	-	<b>0,99</b>	<b>(65,19)</b>	-
1	Pengelolaan Pembibitan kelapa sawit pemerintah	-	-	-	401.550.000,00	-	-	-	-	399.001.350,0	-	-	-	-	0,99	(100,00)	-
2	Pemeliharaan Lanjutan Pembibitan kelapa sawit	-	-	-	68.187.500,00	75.000.000	-	-	-	68.132.500,0	-	-	-	-	1,00	9,99	-
3	Pemeliharaan Kebun Pemerintah	-	-	-	95.525.000,00	110.975.000	-	-	-	95.506.000,0	-	-	-	-	1,00	16,17	-
4	Fasilitasi dan pendampingan kegiatan pengembangan karet rakyat Propinsi Jambi, Intensifikasi karet Propinsi Jambi, peremajaan karet rakyat Dirjenbun dan pengembangan kopi	-	-	-	22.050.000,00	-	-	-	-	21.550.000,00	-	-	-	-	-	(100,00)	-
5	Sharing pemeliharaan kebun induk kopi	-	-	-	35.225.000,00	-	-	-	-	33.425.000,00	-	-	-	-	0,95	(100,00)	-
6	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitasi dan pembinaan replanting sawit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Peningkatan Mutu Kopi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penilaian usaha perkebunan	-	-	-	-	30.754.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-

<b>X</b>	<b>Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian</b>	-	-	-	-	<b>62.631.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	
1	Operasional UPTD wilayah 11 kecamatan pamenang barat dan pamenang selatan	-	-	-	-	1.802.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	
2	Operasional UPTD wilayah 12 kecamatan Tabir selatan dan tabir timur	-	-	-	-	1.772.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	
3	Penyusunan program penyuluh Dinas Kabupaten	-	-	-	-	59.056.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	
<b>XI</b>	<b>Penanganan Panen Dan Pasca Panen Bahan Baku</b>	-	-	-	-	<b>455.567.523,6</b>	<b>244.194.421,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,99</b>	<b>(46,40)</b>	-
1	Pembinaan kelompok tani tembakau dalam penanganan panen dan pasca panen	-	-	-	-	455.567.523,60	244.194.421,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	(46,40)	-
<b>XII</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	-	-	-	<b>1.194.482.500,0</b>	<b>1.094.297.500,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,98</b>	<b>(8,39)</b>	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	(100,00)	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	-	-	-	-	69.850.000,00	75.100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87	7,52	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	-	3.200.000,00	7.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	134,38	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	-	100.678.000,00	102.400.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	1,71	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	13.010.000,00	10.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	(17,37)	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	60.944.600,00	30.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98	(49,30)	-
7	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	25.740.000,00	10.400.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	(59,60)	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	7.502.000,00	5.250.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	(30,02)	-
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	36.000.000,00	23.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	(34,72)	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	27.112.500,00	14.975.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	(44,77)	-
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	-	-	-	-	331.745.400,00	314.322.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	(5,25)	-
12	Penyediaan Jasa Administrasi dan teknis perkantoran	-	-	-	-	482.000.000,00	482.100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	0,02	-
13	Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah	-	-	-	-	35.200.000,00	17.100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	(51,42)	-
<b>XIII</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	-	-	-	<b>331.350.000,0</b>	<b>578.625.000,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,99</b>	<b>74,63</b>	-
1	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	16.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83	(100,00)	-
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	3.150.000,00	176.475.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.502,38	-
5	Pengadaan Meubeleir	-	-	-	-	5.200.000,00	22.400.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	330,77	-
6	Pengadaan Komputer	-	-	-	-	60.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	(100,00)	-
7	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	57.800.000,00	63.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9,00	-
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	10.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	(100,00)	-
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	-	-	177.000.000,00	316.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	78,95	-

<b>XIV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	-	-	<b>13.850.000,0</b>	<b>7.250.000,0</b>	-	-	-	<b>13.850.000,0</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>		(47,65)	-
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	13.850.000,00	7.250.000,0	-	-	-	13.850.000,00	-	-	-	-	1,00		(47,65)	-
<b>XV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	-	-	-	<b>65.455.000,0</b>	<b>85.500.000,0</b>	-	-	-	<b>65.171.000,0</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>		30,62	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	-	-	-	7.825.000,00	7.675.000,0	-	-	-	7.825.000,00	-	-	-	-	1,00		(1,92)	-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	8.167.500,00	8.010.000,0	-	-	-	8.165.500,00	-	-	-	-	1,00		(1,93)	-
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	8.242.500,00	7.925.000,0	-	-	-	8.230.500,00	-	-	-	-	1,00		(3,85)	-
4	Penyusunan Laporan Tahunan	-	-	-	9.695.000,00	8.130.000,0	-	-	-	9.695.000,00	-	-	-	-	1,00		(16,14)	-
5	Penatausahaan dan penyusunan laporan aset SKPD	-	-	-	31.525.000,00	24.705.000,0	-	-	-	31.255.000,00	-	-	-	-	0,99		(21,63)	-
6	Penyusunan Laporan Monitoring Pelaksana SKPD	-	-	-	-	29.055.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00	-
<b>XVI</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan</b>	-	-	-	<b>58.655.000</b>	<b>67.051.000</b>	-	-	-	<b>58.655.000</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>		(14,31)	-
1	Penyusunan Rencana Strategis	-	-	-	11.400.000,00	16.351.000,0	-	-	-	11.400.000,00	-	-	-	-	1,00		43,43	-
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	-	-	-	5.270.000,00	10.375.000,0	-	-	-	5.270.000,00	-	-	-	-	1,00		96,87	-
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	-	-	-	41.985.000,00	40.325.000,0	-	-	-	41.985.000,00	-	-	-	-	1,00		(3,95)	-
<b>XVII</b>	<b>Program Pengembangan data/Informasi/ Statistik daerah</b>	-	-	-	<b>114.022.500,0</b>	<b>70.255.000,0</b>	-	-	-	<b>113.947.500,0</b>	-	-	-	-	1,00		-38,38	-
1	Pengelolaan dan Penyusunan statistik peternakan/ perikanan	-	-	-	114.022.500,00	70.255.000	-	-	-	113.947.500,00	-	-	-	-	1,00		-38,38	-
<b>XVIII</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	-	-	-	<b>36.780.000,0</b>	-	-	-	-	<b>36.770.000,0</b>	-	-	-	-	1,00		-100,00	-
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	36.780.000,00	-	-	-	-	36.770.000,00	-	-	-	-	1,00		-100,00	-
	<b>JUMLAH DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN</b>	-	-	-	<b>13.326.450.470</b>	<b>12.807.827.367</b>	-	-	-	<b>13.012.611.076</b>	-	-	-	-	0,98		-3,89	-



Renstra Disnakhun Kabupaten Merangin 2014–2018 telah revisi sehingga terjadi perubahan indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dengan beberapa indikator baru digunakan.

Hal evaluasi pada target dan realisasi anggaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 maka terdapat beberapa hal penting yang menjadi bahasan diantaranya :

Rasio antara realisasi dan anggaran belanja tidak langsung dari tahun 2014-2016 baik Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dikatakan sangat baik, dengan rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014 adalah sebesar 1,05, tahun 2015 sebesar 0,98 dan tahun 2016 sebesar 0,99, dan rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2014 sebesar 1,03, tahun 2015 sebesar 0,99 dan rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2016 dikatakan baik dengan nilai sebesar 0,85. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2016 dikatakan sangat baik dengan nilai sebesar 0,97.

Untuk rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung baik Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014-2016, Dinas Perkebunan dan Kehutanan tahun 2014-2018 dan Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2017-2018 secara umum dapat dikatakan sangat baik dimana rasionya diatas 0,90.

Rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014-2016 untuk masing-masing program dan kegiatan rata-rata dikatakan sangat baik, namun ada satu program dikatakan kurang baik yaitu pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian yaitu sebesar 0,62 pada tahun 2016, hal ini adalah karena keterlambatan dan proses pencairan, karena adanya pergeseran dan pengurangan anggaran diakhir tahun pada saat perubahan anggaran.

Rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung Dinas Perkebunan dan Kehutanan tahun 2014-2016 untuk masing-masing program dan kegiatan rata-rata dikatakan sangat baik dengan rasio realisasi dan anggaran sebesar antara 0,95-1,00.

Untuk rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung masing-masing program tahun 2017 Dinas Peternakan dan Perkebunan dikataksan sangat baik, dengan rasio nilai antara 0,96-1,00, namun ada satu program dikatakan baik yaitu pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani yaitu sebesar 0,86 pada tahun 2016, hal ini adalah karena keterlambatan dan proses pencairan, karena adanya pergeseran dan pengurangan anggaran diakhir tahun pada saat perubahan anggaran.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman/tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan perkebunan secara optimal di Kabupaten Merangin .

### 3.6.1. Lingkungan internal

#### A. Kekuatan (Strength)

1. Komoditi peternakan dan perkebunan merupakan kebutuhan pokok.
2. Tersedianya sumber daya manusia (aparatur) yang memadai.
3. Adanya teknologi yang mendukung pembangunan peternakan dan Perkebunan.
4. Adanya komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan peternakan dan Perkebunan.
5. Adanya Perda Kab. Merangin No. 38 tahun 2016 tentang Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab Merangin.
6. Tersedianya alokasi anggaran belanja pembangunan;
7. Adanya kebijakan pemerintah tentang penggunaan pupuk organik.

#### B. Kelemahan (Weaknesses)

1. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur masih terbatas.
3. Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
4. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat tentang peternakan dan Perkebunan.

5. Pola berbudidaya peternakan dan Perkebunan, pada umumnya berpola sambilan

### 3.6.2. Lingkungan Eksternal

#### A. Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya sumber daya manusia (petani peternak dan kebun) yang memadai.
2. Tersedianya sumber daya alam yang mendukung pembangunan peternakan dan Perkebunan.
3. Perda Kab. Merangin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018–2023.
4. Permintaan pasar yang cukup tinggi baik lokal maupun regional akan produk-produk peternakan dan Perkebunan.
5. Kabupaten Merangin yang merupakan wilayah strategis yang terletak di tengah kabupaten lain.
6. Adanya pola kawasan pembangunan peternakan dan Perkebunan.
7. Adanya kelembagaan ekonomi/sosial di pedesaan yang potensial untuk mendukung pembangunan peternakan dan Perkebunan.
8. Adanya kebijakan pemerintah tentang penggunaan pupuk organik.
9. Perlu adanya peningkatan pemanfaatan limbah peternakan menjadi bahan yang lebih bernilai manfaat

#### B. Ancaman (Threats)

1. Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya peternak dan petani kebun.
2. Produksi dan Produktifitas Peternakan dan Perkebunan yang saat sekarang cenderung menurun.
3. Masih tingginya ancaman penyakit ternak dan hama tanaman perkebunan yang perlu tindakan berkelanjutan dan perlu multi koordinasi antar instansi dan antar wilayah.
4. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan dan Perkebunan sehingga memiliki daya saing.
5. Adanya resiko terhadap penularan penyakit dari hewan ke manusia (Zoonosis).
6. Ancaman bencana alam (banjir, tanah longsor dan lain-lain).

## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin diperlukan dalam rangka pembangunan peternakan dan perkebunan di Kabupaten Merangin 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Gambaran pelayanan OPD	Pencapaian produksi Peternakan	Sasaran Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya unit kerja yang menangani baik dinas maupun UPTD teknis</li> <li>2. Ketersediaan dukungan Anggaran</li> <li>3. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>4. Ketersediaan SDM aparatur, petugas teknis dan penyuluh di lapangan.</li> <li>5. Penguatan kelembagaan perpertanian.</li> <li>6. Masih terbatasnya Data kelembagaan dan pelaku utama pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktifitas komoditi peternakan dan tanaman perkebunan</li> <li>2. Kondisis sarana dan prasarana pendukung</li> <li>3. Kelembagaan kelompok tani</li> <li>4. Ancaman hama tanaman dan penyakit ternak</li> <li>5. Nilai tambah dan nilai jual produk peternakan dan perkebunan rendah</li> <li>6. Akseibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran terbatas</li> <li>7. Pemakaian pupuk kimia.</li> <li>8. Berkembangnya penakar bibit tanaman kepala sawit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan kuantitas Aparatur kurang memadai</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana</li> <li>3. Masih rendahnya kucuran anggaran untuk sub sektor peternakan dan perkebunan</li> <li>4. Rendahnya produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan</li> <li>5. Rendahnya kualitas Pakan</li> <li>6. Masih rendahnya ketersediaan benih/ bibit peternakan dan perkebunan bermutu baik Kualitas maupun kuantitas</li> <li>7. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian</li> <li>8. Belum optimal penanggulangan penyakit ternak dan hama tanaman perkebunan</li> <li>9. Menurunnya kesuburan tanah</li> <li>10. Kebun sawit masyarakat rata-rata sudah tua</li> <li>11. Panjangnya tata niaga produk peternakan dan perkebunan</li> <li>12. Sebagian besar pola usaha peternakan dan perkebunan skala rumah tangga</li> <li>13. Masih tingginya angka pemotongan betina produktif</li> <li>14. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan yang ASUH</li> </ol>

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Merangin yang cukup luas.
2. Keterbatasan sumber pendanaan sektor peternakan dan perkebunan menjadi titik krusial untuk mengembangkan program/kegiatan yang efektif dan efisien.
3. Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul lokal dan benih unggul lokal
5. Pengembangan budidaya ternak dan tanaman perkebunan yang mampu meningkatkan produksi ternak dan perkebunan sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan kebutuhan akan daging, telur dari luar daerah.
6. Peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga beberapa penyakit menular baik antar ternak ataupun kepada manusia dapat dicegah dengan cepat, dan peningkatan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan.
7. Penerapan teknologi peternakan dan perkebunan tepat guna dimasyarakat sehingga dapat memudahkan budidaya ternak maupun kebun.
8. Pengembangan pakan dan hijauan makanan ternak (HMT) sehingga pakan dan hijauan dapat terus tersedia dengan kualitas yang baik.
9. Peningkatan pemasaran hasil peternakan dan perkebunan belum maksimal.
10. Peningkatan kelembagaan peternakan dan perkebunan yang mendukung produktivitas ternak dan tanaman perkebunan.
11. Peningkatan sarana, infrastruktur peternakan dan perkebunan guna mendukung produksi hasil peternakan dan perkebunan.
12. Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Merangin dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dilihat tabel di bawah ini :

Visi Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Merangin Tahun 2018-203" adalah sebagai berikut :

## Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju "Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023"

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Merangin 2018-2023.

1. Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke satu yaitu "Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata dan keempat yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government.

Beberapa tujuan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berhubungan untuk Mengembangkan sumberdaya bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata.
- b. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif , bersih dan melayani.

Sedangkan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berhubungan untuk Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata antaran lain :

- a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan.
- c. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM
- d. Meningkatnya realisasi investasi
- e. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal.

Sedangkan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berhubungan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif , bersih dan melayani antaran lain :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”			
Misi/Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi Ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata			
Sasaran : • Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani	a. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas belum optimal. b. Penerapan teknologi belum optimal. c. Penanggulangan penyakit ternak dan hama tanaman perkebunan Belum optimal. d. Peran dan fungsi lembaga dalam peningkatan daya produk unggulan daerah belum optimal. e. Kualitas produk unggulan daerah belum optimal. f. Pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan dan perkebunan yang ASUH belum optimal.	a. Ketersediaan bibit/benih, infrastruktur, dan sarana prasarana produksi yang terbatas. b. Kualitas SDM masih rendah. c. Pengamatan dan kesiapan dalam penanggulangan penyakit dan hama tanaman. d. Kualitas sumberdaya peternakan dan perkebunan belum optimal. e. Input dan penerapan teknologi peternakan dan perkebunan belum optimal. f. Belum terjalinnya kerjasama yang baik dengan Stakeholders produk peternakan dan perkebunan.	a. Sektor Pertanian merupakan prioritas utama visi pembangunan kepala terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. b. Adanya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM. c. Lokasi Kabupaten Merangin yang strategis sebagai jalur lalu lintas hasil dan pemasaran hasil pertanian dari berbagai daerah. d. Berkembangnya minat masyarakat terhadap sub sektor perkebunan dan peternakan e. Banyaknya stakeholders peternakan dan perkebunan.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Urusan Pertanian di tingkat kementerian/lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian. Visi Kementerian Pertanian yaitu “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani” dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada swasembada pangan dan diversifikasi pangan. Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan, kecuali sasaran yang mengarah pada swasembada tanaman pangan dan peningkatan produksi yang tidak menjadi fokus kegiatan di Kabupaten Merangin. Faktor–faktor penghambat dan faktor–faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	a. Jumlah populasi ternak di kabupaten relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan daging. b. Pengembangan tanaman tebu (gula) di kabupaten Merangin bukan komoditi unggulan daerah	a. Angka pemotongan ternak relatif tinggi, perkembangan populasi ternak relatif rendah. b. Tidak ada kegiatan pengembangan tebu	Tanaman kelapa sawit rata-rata sudah masih untuk di replanting, sehingga minat memelihara ternak khususnya ternak sapi meningkat
2.	Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	a. Peran dan fungsi lembaga dalam peningkatan daya produk unggulan daerah belum optimal. b. Kualitas produk unggulan daerah belum optimal. c. Pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan dan perkebunan yang ASUH belum optimal	a. Kualitas sumberdaya peternakan dan perkebunan belum optimal. b. Input dan penerapan teknologi peternakan dan perkebunan belum optimal. c. Belum terjalannya kerjasama yang baik dengan Stakeholders produk peternakan dan perkebunan.	a. Lokasi Kabupaten Merangin yang strategis sebagai jalur lalu lintas hasil dan pemasaran dari berbagai daerah. b. Berkembangnya minat masyarakat terhadap sub sektor perkebunan dan peternakan c. Banyaknya stakeholders peternakan dan perkebunan.
3.	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	Tidak dilaksanakan		
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani	Nilai tukar produk petani khusus peternakan dan perkebunan relatif kecil	Kualitas produk peternakan dan perkebunan relatif rendah	Harga komoditi peternakan dan perkebunan di tingkat petani relatif rendah

### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Serta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah "Mewujudkan pertanian tangguh, berdaya saing, berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, sebagai penggerak perekonomian regional" dengan sasaran peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani.

Visi Perkebunan Provinsi Jambi adalah " Terwujudnya Perkebunan yang Berkelanjutan dan berdaya saing Menuju Jambi Tuntas 2021". dengan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunan, serta pengawasan peredaran benih dan sarana input.
3. Meningkatkan kemandirian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman Perkebunan.
4. Meningkatkan kualitas SDM pekebun melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE).
5. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di areal perkebunan rakyat.
7. Meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta kebakaran lahan kebun.
8. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat investor dalam pengembangan perkebunan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha Perkebunan.

Faktor–faktor penghambat dan faktor–faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jambi serta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya swasembada pangan strategis secara berkelanjutan	Pencapaian swasembada khususnya daging di kabupaten Merangin sulit tercapai terkendala populasi sangat relatif kecil, angka kelahiran yang relatif rendah	Perkembangan ternak sapi relatif rendah, angka pemotongan ternak relatif tinggi	Minat dan animo masyarakat untuk memelihara ternak relatif tinggi
2	Terwujudnya kelembagaan pertanian yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan petani	Kelembagaan sudah terbentuk tapi peran dan fungsi kelembagaan belum maksimal	Rendahnya kualitas kelembagaan pertanian di masyarakat	
3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Untuk nilai tambah sudah baik, namun jangkauan daya beli konsumen sangat rendah dengan pendapatan yang relatif kecil	Kualitas Produk peternakan masih relatif rendah	Banyaknya produk olahan peternakan yang dihasilkan
4	Meningkatnya ketersediaan bibit ternak baik jumlah maupun mutu melalui pengembangan kelompok pembibitan ternak yang tersebar pada kawasan sentra produksi peternakan	Jumlah ketersediaan bibit sangat terbatas, masih menggunakan sistem kawin alam, sebagian kecil yang menggunakan teknologi IB	Peternak yang menggunakan teknologi masih relatif kecil	Kualitas hasil teknologi sudah teruji
5	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak sehingga dapat menurunkan pemasukan ternak dan produk hasil peternakan dari luar daerah	Produktifitas ternak relatif rendah, baik kelahiran maupun pengadaan yang relatif kecil	Anggaran untuk pengadaan relatif rendah, angka kelahiran relatif kecil dengan angka pemotongan yang relatif cukup tinggi	
6	Meningkatnya derajat kesehatan hewan yang tercermin dari penurunan jumlah kasus penyakit hewan dan meningkatnya wilayah atau zona bebas penyakit hewan	Peningkatan derajat kesehatan hewan masih terbatas, dengan anggaran untuk pengadaan obat dan pelayanan keswan kecil	Kesadaran peternak untuk mendapatkan pelayanan keswan yang relatif masih rendah	
7	Menurunnya derajat kontaminasi dan residu produk hewan yang tergambar dengan meningkatnya unit usaha yang menerapkan ASUH.	Pengawasan produk hasil ternak yang ASUH masih relatif kecil	Sulitnya mendapat hasil olahan produk peternakan di masyarakat, dan keterbatasan anggaran	
8	Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman karet, sawit, kopi dan pinang.	Produksi dan produktifitas komoditi utama tanaman perkebunan masih relatif rendah	Masih banyaknya beredar bibit tanaman perkebunan yang berkualitas rendah, harga pupuk yang relatif mahal	
9	Peningkatan peredaran dan penggunaan benih unggul bersertifikat	Penggunaan bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat masih relatif rendah	Masih banyaknya beredar bibit tanaman perkebunan yang berkualitas rendah,	Permintaan akan bibit tanaman perkebunan semakin meningkat
10	Peningkatan SDM perbenihan baik petugas maupun produsen benih	Penggunaan bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat masih relatif rendah	Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM	Ketersediaan SDM yang relatif cukup

Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin masih jauh di bawah sasaran Renstra Dinas Provinsi dan Renstra Kementerian Pertanian. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Bila dilihat dari indikator kinerja yang digunakan, terlihat adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pada setiap indikator kinerja.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan RTRW pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Tetap terjaga kualitas lingkungan.
- b. Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah yang berbasis perekonomian lokal.
- c. Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal.

Kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Merangin juga diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas sebesar 75% dari luas kawasan tanaman pangan berupa pertanian pangan lahan basah. Pemanfaatan ruang kawasan pertanian ini meliputi kawasan peruntukan pertanian pangan lahan basah dan kawasan peruntukan pertanian pangan lahan kering untuk lebih jelas peruntukan kawasan RTRW kabupaten untuk sektor pertanian secara umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2034 dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. : Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan perkebunan a. Perkebunan Kelapa Sawit b. Perkebunan Karet c. Perkebunan Kopi d. Perkebunan Nilam e. Perkebunan Tembakau	a. Alih fungsi lahan perkebunan ke pemukiman b. Harga komoditi perkebunan masih berfluktuatif c. Maraknya perambahan hutan untuk lahan perkebunan	a. Pemanfaatan Lahan tidak sesuai dengan Tata Ruang b. kebijakan harga pemerintah masih lemah c. Penegakan hukum yang masih lemah	a. Sektor pertanian secara umum terus menunjukkan perkembangan b. Komoditi perkebunan merupakan kebutuhan pokok. c.
2.	Kawasan peternakan a. Peternakan Sapi b. Peternakan Kerbau c. Peternakan Domba d. Peternakan Unggas	a. Lahan untuk peternakan makin relatif kecil b. Lahan untuk HMT makin relatif kecil c. Polusi udara dari kegiatan peternakan	a. Lahan peternakan tidak perlu lahan khusus b. Musim kemarau pakan HMT juga terbatas c. Lahan peternakan umumnya di sekitar perumahan	a. Komoditi peternakan merupakan kebutuhan pokok. b. Banyak lahan kosong di sekitar lahan tanaman perkebunan dan pekarangan bisa ditanam HMT. c. Lahan peternakan tidak memerlukan lahan yang luas

Dengan luas lahan perkebunan secara umum sebesar 271.979 Ha dan luas kawasan peternakan secara umum adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin tahun 2014-2034, maka dan ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Merangin Tahun 2015 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2015 tentang Sentra Peterakan Rakyat (SPR) yang memperkuat kawasan peternakan di Kabupaten Merangin.

Hal-hal yang dapat dikaji dari tabel tersebut diatas diantaranya adalah :

1. Komoditi peternakan dan perkebunan merupakan kebutuhan pokok.
2. Penyebaran ternak masih kurang terpusat di titik potensial.
3. Pengembangan perkebunan harus terus ditingkatkan.
4. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya Perkebunan.

#### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Merangin Tahun 2018, permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin serta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan peternakan dan perkebunan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6. : Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan akses pemasaran hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Merangin	Masih rendahnya produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak bibit, benih peternakan dan perkebunan yang kurang rendah kualitasnya beredar dimasyarakat.</li> <li>- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi.</li> <li>- Umumnya masyarakat belum maksimal dalam pemupukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya sumber-sumber bibit, benih yang berkualitas</li> <li>- Banyaknya teknologi di bidang peternakan dan perkebunan untuk meningkatkan kualitas peternakan dan perkebunan</li> <li>- Pupuk yang digunakan umumnya pupuk ilegal</li> </ul>



### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi dan nasional berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2018.

Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (sustainable) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektro-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dan kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Merangin mempunyai luas mencapai 7.679 Km<sup>2</sup> menjadi kekuatan besar menggerakkan lokomotif ekonomi Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin memiliki geografi yang bervariasi (dataran sedang sampai dataran tinggi) yang sangat baik pengembangan ternak baik ternak besar, kecil maupun unggas.
2. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan masih terbatas.

4. Sarana dan prasarana penunjang kerja aparaturnya masih terbatas.
5. Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Anggaran pembangunan pertanian belum mendapat alokasi dana yang cukup untuk memacu pembangunan pertanian
7. Kecenderungan penurunan populasi ternak sapi di kabupaten Merangin semata mata tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen saja akan tetapi penanganan penerapan teknologi yang kurang maksimal dilaksanakan seperti Inseminasi Buatan yang dapat meningkatkan angka kelahiran ternak.
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan produksi, budidaya maupun pemasaran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya Perkebunan melalui kegiatan intensifikasi budidaya Perkebunan.
10. Sebagai sub sektor peternakan dan perkebunan merupakan bagian sektor pertanian yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten, untuk peternakan terjadi penurunan sumbangan PDRB bila dibandingkan PDRB provinsi dan kementerian lebih tinggi dari Kabupaten.
11. Populasi ternak sapi di kabupaten Merangin perkembangan sangat kecil bila dibandingkan dengan provinsi dan pusat.
12. Bila dilihat sumber daya alam dan SDM peternak Kabupaten Merangin merupakan potensi baik untuk pengembangan ternak sapi potong.
13. Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten bila dibandingkan dengan Provinsi dan Pusat.
14. Sebagian besar lahan di kabupaten Merangin merupakan lahan perkebunan baik sawit, karet, kopi, kelapa dan lain-lain.
15. Untuk peternakan semua lahan bisa untuk pengembangan ternak, tapi sudah di petakan berdasarkan potensi masing-masing kecamatan.
16. Berdasarkan RT/RW kabupaten Merangin potensi wilayah pengembangan ternak sapi ada 8 (delapan) kecamatan, kerbau 11 (sebelas) kecamatan, kambing 12 kecamatan, domba 3 kecamatan dan unggas 24 kecamatan.
17. Berdasarkan RT/RW kabupaten Merangin potensi pengembangan perkebunan 16 kec. Kawasan kelapa sawit, 17 kec. Kawasan karet, 3 kec kawasan kopi, dan 3 kec. Kawasan nilam.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan dan sasaran kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan baik urusan peningkatan SDM aparatur, petani dan SDM pelaku usaha peternakan dan Perkebunan maupun urusan pilihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peternak dan pekebun. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan		1. Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha peternakan	3,50	3,59	3,68	3,77	3,86
		2. Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha perkebunan	4,50	4,61	4,73	4,85	4,97
	Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani	1. Jumlah Produksi Daging (Kg)	1.995.085	2.234.495	2.502.635	2.802.951	3.139.305
		2. Jumlah Produksi Telur (Kg)	657.336	706.636	759.634	816.607	877.852
		3. Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	200.056	215.061	218.287	234.658	252.257
		4. Jumlah Produksi Kopi (Ton)	8.520	9.371	11.339	12.473	13.720
		5. Jumlah Produksi Karet (Ton)	75.802	79.591,7	83.571,3	87.749,8	92.137,3
		6. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)	99,30	99,55	99,79	100,04	100,29
		7. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) (%)	97,18	97,43	97,67	97,91	98,16
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi Peternakan dan Perkebunan	Nilai Evaluasi AKIP Disnabun	B	BB	BB	A	A

Tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan 1) yaitu Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan dengan indikator 1) Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha peternakan sebesar 3,50% tahun 2019 dan tahun 2023 sebesar 3,86% dengan rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 2,5%, 2) Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha perkebunan tahun 2019 sebesar 4,50% dan di tahun 2023 menjadi 4,97% dengan rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 2,5%, tujuan ini sasaran yaitu : sasaran Meningkatkan produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani dengan indikator sebanyak 7 (lima) indikator yaitu 1) produksi daging tahun 2019 sebesar 1.995.085 kg dan menjadi sebesar pada tahun 2023 sebesar 3.139.305 kg, 2) produksi telur tahun 2019 sebesar 657.336 kg dan menjadi sebesar 877.852 kg tahun 2023, 3) produksi kelapa sawit tahun 2019 sebesar 200.056 ton dan menjadi 252.257 ton tahun 2023, 4) produksi kopi tahun 2019

sebesar 8.520 ton dan menjadi 13.720 ton tahun 2023, 5) produksi karet tahun 2019 sebesar 75.802 ton dan menjadi 92.137,3 ton pada tahun 2023 yang mana rata-rata kenaikan setiap tahun semua indikator adalah sebesar 2,5%, dan 6) Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) pada tahun 2019 sebesar 99,30% dan menjadi 100,29% tahun 2023, serta 7) Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) tahun 2019 sebesar 97,18% dan menjadi sebesar 98,16% tahun 2023 dengan rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 0,25%.

Sedangkan tujuan 2) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan dengan sasaran 1) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan dan Perkebunan tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2018–2023. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan.	Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan
2	Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.	
3	Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
4	Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan
5	Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan
6	Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan
7	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin pada Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagaimana terlampir pada Tabel di bawah :

Tabel 5.2. Keterkaitan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023

VISI : Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju "MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023"				
Misi Ke -1 dan 5 Kepala Daerah terpilih	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan.</li> <li>o Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan.</li> </ul>

			sektor peternakan dan perkebunan.	
			o Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	o Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
			o Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	o Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan
			o Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	o Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan
			o Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	o Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan
Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas sangat berat terkait dengan dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan Peternakan dan Perkebunan. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin selama kurun waktu lima tahun disajikan dibawah ini dan dalam matriks tabel 6.1. Berikut ini ;

A. Kegiatan pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) Program sebagai berikut :

I. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular
2. Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keswan dan Puskeswan
3. Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH
4. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner

II. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
2. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
3. Penggemukan Sapi/Penyediaan Stock Pangan Asal Ternak Pada Hari Raya
4. Penilaian Petani dan Lembaga Petani Peternakan
5. Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan kemampuan
6. Pengadaan Pakan dan Sarana Prasarana Peternakan

III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

IV. Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Kelompok Tani Tembakau dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau

V. Program Peningkatan Produksi Perkebunan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan
2. Fasilitasi Pendampingan dan Pembinaan Peremajaan Tanaman Perkebunan
3. Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan
4. Promosi Atas Hasil Produksi Unggulan Daerah
5. Fasilitasi Penyusunan RDK dan RDKK
6. Pengendalian dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
7. Pengelolaan Pembibitan Tanaman Produksi Perkebunan
8. Dukungan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
9. Penilaian Petani dan Lembaga Petani Perkebunan
10. Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan
11. Pembangunan, Perluasan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah

B. Kegiatan penunjang pembangunan yang terdiri dari 7 (tujuh) Program sebagai berikut :



- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi
  10. Penyediaan Makanan dan Minuman
  11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
  13. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  1. Pembangunan Gedung Kantor
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  3. Pengadaan Meubeler
  4. Pengadaan Komputer
  5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
  8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  10. Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor
  11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- III. Program Peningkatan Disiplin
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
- IV. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
  1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang Undangan
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD
3. Penyusunan Laporan Tahunan
4. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD
5. Pengelolaan Data Peternakan dan Perkebunan
6. Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
- VI. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  1. Penyusunan Standard Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- VII. Program Perencanaan Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Rencana Strategis OPD
  2. Penyusunan Rencana Kerja OPD
  3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
  4. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sasaran	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan			Persentase pertumbuhan lapangan usaha peternakan PDRB usaha peternakan	%	3,41	3,50		3,59		3,68		3,77		3,86		3,86					
	Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani			Persentase pertumbuhan lapangan usaha perkebunan PDRB usaha perkebunan	%	3,49	4,50		4,61		4,73		4,85		4,97		4,97					
				Jumlah Produksi Daging	Kg	1.781.325,80	1.995.085		2.234.495		2.502.634		2.802.951		3.139.305		12.674.470					
				Jumlah Produksi Telur	Kg	611.475,46	657.336		706.636		759.634		816.607		877.852		3.818.065					
				Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	186.099	200.056		215.061		218.287		234.658		252.257		1.120.319					
				Jumlah Produksi Kopi	Ton	7.745	8.520		9.371		11.339		12.473		13.720		55.423					
				Jumlah Produksi Karet	Ton	72.192	75.802		79.591,7		83.571,3		87.749,8		92.137,3		418.852					
				Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	%	99,05	99,30		99,55		99,79		100,04		100,29		100,29					
			Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR)	%	96,94	97,18		97,43		97,67		97,91		98,16		98,16						
	3.03.3.03.2.21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penurunan kasus penyakit ternak	%	9,20	9,20	463.800.000	9,20	827.391.000	9,20	943.561.000	9,20	1.044.024.000	9,20	1.113.317.000	9,20	3.928.293.000				
1	3.03.3.03.2.21.01		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Jumlah ternak yang divaksin dan pelayanan kesehatan ternak	Ekor	1.175	2.000	202.900.000	2.500	667.345.000	3.000	768.377.000	3.500	856.104.000	4.000	913.390.000	15.000	3.205.216.000			Kab. Merangin	
2	3.03.3.03.2.21.02		Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keswan dan Puskesmas	Jumlah UPTD Puskesmas yang terbina serta sarana prasarana yang disediakan	Unit	1	1	21.000.000	1	23.000.000	1	26.450.000	1	29.756.000	1	32.137.000	5	132.343.000			Desa Pinang Merah, Rawa Jaya dan Sei. Manau	
3	3.03.3.03.2.21.03		Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	Jumlah pemotongan ternak jantan dan betina tidak produktif di RPH	Ekor	1.500	1.500	-	1.500	100.375.000	1.500	110.413.000	1.500	118.693.000	1.500	127.332.000	7.500	456.839.000			Pulau Rayo Bangko	
4	3.03.3.03.2.21.04		Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemotongan ternak pada hari-hari besar di luar RPH	Ekor	1.000	1.500	-	1.750	36.671.000	2.000	38.321.000	2.250	39.471.000	2.500	40.458.000	10.000	154.921.000				
	3.03.3.03.2.22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Jumlah Populasi Ternak Sapi	ekor	17.136	19.192	2.703.860.000	21.495	4.911.780.552,00	24.075	3.551.186.211,40	26.964	3.565.897.304,00	30.199	3.647.748.045,32	30.199	18.368.246.963,68				
2. Jumlah Populasi Ternak Kerbau				ekor	4.449	4.605	4.651		4.698		4.745		4.792		4.792							
3. Jumlah Populasi Ternak Kambing				ekor	34.148	35.855	37.648		39.531		41.507		43.582		43.582		43.582					
4. Jumlah Populasi Ternak Unggas				ekor	1.741.377	1.915.515	2.107.066		2.317.773		2.549.550		2.804.505		2.804.505		2.804.505					

1	3.03.3.03.2.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak yang diadakan	Unit	3	3	873.560.000	15	2.262.402.552	10	1.018.921.148	11	1.012.378.066	12	1.285.357.814	51	6.452.619.580		Desa Pinang Merah Kab. Merangin
2	3.03.3.03.2.22.02	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah bibit ternak yang didistribusi	Ekor	17	87	468.920.000	20	487.677.000	25	484.255.563	30	493.772.963	30	491.519.396	192	2.426.144.922		Kab. Merangin
3	3.03.3.03.2.22.03	Penggemukan sapi/ penyediaan stock pangan asal ternak pada hari raya	Jumlah stock pangan hasil ternak diadakan	Ekor	-	-	-	10	195.000.000	15	196.930.500	15	206.777.025	15	209.878.680	55	808.586.205		Kab. Merangin
4	3.03.3.03.2.22.04	Penilaian Petani dan Lembaga Petani Peternakan	Jumlah Lembaga petani dan petugas peternakan berprestasi	Orang	2	2	12.070.000	2	25.400.000	2	26.670.000	2	28.003.500	2	29.403.675	10	121.547.175		Kab. Merangin
5	3.03.3.03.2.22.05	Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan kemampuan Kelembagaan petani Peternakan	Jumlah lembaga petani peternakan yang dilatih	Kelompok	2	2	-	2	31.080.000	2	34.188.000	2	37.606.800	2	41.367.480	10	144.242.280		Kab. Merangin
6	3.03.3.03.2.22.06	Pengadaan Pakan dan Sarana Prasarana Peternakan	Jumlah pakan dan sarana prasarana peternakan yang diadakan	Jenis	2	3	-	6	1.910.221.000	8	1.790.221.000	8	1.787.358.950	9	1.590.221.000	34	7.078.021.950		Desa Pinang Merah dan Kab. Merangin
	3.03.3.03.2.22.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diadakan	Unit	2	3	142.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	142.310.000		Kab. Merangin
	3.03.3.03.2.22.08	Pengembangan Pakan ternak	Jumlah pakan ternak yang diadakan	Paket	2	2	1.207.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.207.000.000		UPTD Pembibitan Ternak
	3.03.3.03.2.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	%	7,50	7,50	24.240.000	7,50	124.415.000	7,50	128.599.000	7,50	129.016.000	7,50	139.569.000	7,50	545.839.000		
1	3.03.3.03.2.24.01	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi IB yang diadakan	Unit	2	2	24.240.000	10	124.415.000	7	128.599.000	4	129.016.000	4	139.569.000	27	545.839.000		
	..3.03.2.42	Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau	Peningkatan Jumlah Produksi Tanaman Tembakau	Ton	16	16	220.000.000	17	241.000.000	18	265.100.000	19	291.610.000	20	320.771.000	90	1.338.481.000		
1	..3.03.2.42.01	Pembinaan kelompok tani tembakau dalam penanganan panen dan pasca panen tembakau	Jumlah Kelompok tani tembakau yang dibina	Kelompok	0	1	220.000.000	2	241.000.000	2	265.100.000	2	291.610.000	2	320.771.000	9	1.338.481.000		
	3.03.3.03.2.45.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	(Kg /Ha/Th )	4.253	4.678		5.263		5.921		6.661		7.494		7.494			
			Peningkatan Produktivitas Kopi	(Kg /Ha/Th )	1.223	1.370	1.896.787.000	1.534	3.143.365.000	1.718	4.075.203.000	1.924	4.087.642.000	2.155	4.168.480.000	2.155	17.371.498.000		
			Peningkatan Produktivitas Karet	(Kg /Ha/Th )	941	1.035		1.139		1.253		1.378		1.516		1.516			
1	3.03.3.03.2.45.02	Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian usaha Perkebunan	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	Perusahaan	1	5	-	5	43.506.000	5	45.681.000	5	47.963.000	5	50.363.000	25	187.513.000		Kab. Merangin

2	3.03.3.03.2.45.03	Fasilitasi pendampingan dan pembinaan peremajaan tanaman perkebunan	Jumlah pendampingan perkebunan rakyat	Kali	-	2	-	4	105.000.000	4	110.000.000	4	149.250.000	4	167.363.000	16	531.613.000	Kabupaten Merangin
3	3.03.3.03.2.45.04	Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan	Jumlah Pembangunan jalan usaha tani/produksi perkebunan	Km	3	-	-	3	450.000.000	3	495.000.000	3	517.500.000	3	599.500.000	12	2.062.000.000	Kabupaten Merangin
4	3.03.3.03.2.45.06	Promosi atas hasil produksi unggulan daerah	Jumlah promosi hasil produksi peternakan dan perkebunan tingkat kabupaten, provinsi & pusat	Kali	3	4	-	4	200.525.000	4	220.577.000	3	220.577.000	4	242.634.400	16	884.313.400	Bangko dan Luar Daerah
5	3.03.3.03.2.45.07	Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK	Jumlah Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK	Kali	-	4	-	4	8.035.000	4	8.436.000	4	8.859.500	4	9.302.000	16	34.632.500	Bangko
6	3.03.3.03.2.45.08	Pengendalian dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Pengendalian Penanganan gangguan usaha perkebunan	Kali	1	-	-	8	60.233.000	8	51.547.000	8	62.597.000	8	66.274.000	16	240.651.000	Kabupaten Merangin
7	3.03.3.03.2.45.09	Pengelolaan Pembibitan Tanaman Produksi Perkebunan	Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan	Batan g, Keca mbah, Biji, Stek	-	21.000	1.315.764.900	40.000	1.260.043.900	40.000	1.282.889.900	40.000	1.387.507.400	40.000	1.279.166.500	181.000	6.525.393.000	UPTD Pembibitan dan Kab. Merangin
8	3.03.3.03.2.45.10	Dukungan Pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan	Jumlah dukungan pengelolaan pemasaran hasil perkebunan	Unit	-	2	-	20	540.000.000	20	558.000.000	7	461.600.000	5	350.000.000	54	1.909.600.000	Kabupaten Merangin
9	3.03.3.03.2.45.11	Penilaian Petani dan Lembaga Petani Perkebunan	Jumlah Petani dan Lembaga Petani berprestasi Perkebunan	Orang	1	2	-	2	25.000.000	2	26.250.000	2	27.563.000	2	28.941.000	10	107.554.000	Kabupaten Merangin
10	3.03.3.03.2.45.12	Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan kemampuan kelembagaan petani perkebunan	Jumlah lembaga petani perkebunan yang dilatih	Kelompok	3	3	-	3	70.000.000	3	94.500.000	3	99.225.000	3	104.186.000	15	367.912.000	Kabupaten Merangin
11	3.03.3.03.2.45.25	Pembangunan, perluasan dan pemeliharaan kebun pemerintah	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan kebun Pemerintah	Bulan	12	12	581.022.000	12	381.022.000	12	1.182.322.000	12	1.105.000.000	12	1.270.750.000	60	4.520.116.000	Kec. Bangko Simpang Limbur
	3.03.3.03.2.45.26	Penilaian Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dinilai	Perusahaan	12	2	67.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67.250.000	Kab. Merangin
	3.03.3.03.2.45.30	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	Perusahaan	1	5	38.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	38.300.000	Kab. Merangin
	3.03.3.03.2.45.31	Fasilitasi dan Pendampingan kegiatan perkebunan rakyat Provinsi Jambi	Jumlah pendampingan perkebunan rakyat	Kali	-	2	71.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	71.500.000	Kab. Merangin
	3.03.3.03.2.36	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Pembinaan Kelompok Tani Sapi Potong dan Kelapa Sawit	%	1,00	1,00	114.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	114.920.000	
	3.03.3.03.2.36.01	Penanganan Gangguan Usaha perkebunan	Jumlah Penanganan gangguan usaha	Kali	1	8	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13.000.000	Kantor Disnabun

			perkebunan															
3.03.3.03.2.36.02	Pengendalian Kebakaran Lahan/Kebun dan Sosialisasi PLTB	Jumlah Pengendalian kebakaran lahan/kebun	Kali	1	8	12.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12.650.000		Kab. Merangin
3.03.3.03.2.36.03	Penilaian Petani dan Lembaga Petani	Jumlah Petani berprestasi Perkebunan	Orang	1	1	23.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.200.000		Kab. Merangin
		Jumlah lembaga petani berprestasi Perkebunan	Kelompok	1	1										1			
3.03.3.03.2.36.05	Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK	Jumlah Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK	Kali	2	4	6.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.700.000		Kab. Merangin
3.03.3.03.2.36.06	Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Meningkatnya kemampuan anggota lembaga petani Perkebunan	Orang	3	50	59.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	59.370.000		Kab. Merangin
3.03.3.03.2.46	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Persentase Pemasaran Produksi Peternakan dan Perkebunan yang diikuti	%	75	100	1.017.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.017.813.000		
3.03.3.03.2.46.01	Dukungan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah dukungan pengelolaan pemasaran hasil perkebunan	Unit	0	1	50.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.500.000		Kab. Merangin
3.03.3.03.2.46.02	Promosi atas hasil produksi unggulan daerah	Jumlah promosi hasil produksi peternakan dan perkebunan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat	Kali	3	4	86.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	86.500.000		Kab. Merangin
3.03.3.03.2.46.03	Pembangunan Jalan Usaha Tani perkebunan	Jumlah Pembangunan jalan usaha tani/ produksi perkebunan	Km	3	3	880.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	880.813.000		Kab. Merangin
3.03.3.03.2.25	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan	Peningkatan Konsumsi Daging	(Kg/Kapita/Th)	-	4,93	603.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.250.000		
3.03.3.03.2.25.01	Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	Jumlah pemotongan ternak jantan dan betina tidak produktif di RPH	Ekor	1.500	1.500	520.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	520.250.000		Pulau Rayo Bangko
3.03.3.03.2.25.02	Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemotongan ternak pada hari-hari besar di luar RPH	Ekor	1.000	1.500	83.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	83.000.000		Kab. Merangin
		Jumlah sampel produk peternakan diperiksa	Sampel	50	60										60			
		<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>7.250.640.470</b>		<b>9.275.475.552</b>		<b>8.992.578.811</b>		<b>9.148.268.104</b>		<b>9.421.695.645</b>		<b>43.693.350.964</b>		

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sasaran	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.3.03.2.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	75	96	1.237.49 8.000	97	1.393.41 4.000	98	1.533.44 8.000	98	1.699.23 9.000	98	1.872.04 8.000	98	7.735.64 7.000		
	1.01.3.03.2.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terselesaikan	Surat	0	40	1.500.00 0	45	1.650.00 0	50	1.815.00 0	55	1.997.00 0	60	2.190.00 0	250	9.152.00 0		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12	12	80.000.0 00	12	90.000.0 00	12	100.000. 000	12	110.000. 000	12	120.000. 000	60	500.000. 000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya	Unit	5	59	17.000.0 00	68	18.700.0 00	74	20.570.0 00	74	22.627.0 00	74	24.890.0 00	349	103.787. 000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Disnabun yang disediakan	Bulan	12	12	204.230. 000	12	224.653. 000	12	247.118. 000	12	271.830. 000	12	299.013. 000	60	1.246.84 4.000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	10.000.0 00	12	11.000.0 00	12	12.100.0 00	12	13.310.0 00	12	14.641.0 00	60	61.051.0 00		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Bulan	12	12	35.000.0 00	12	38.500.0 00	12	42.350.0 00	12	46.585.0 00	12	51.244.0 00	60	213.679. 000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	5	8	40.250.0 00	8	44.275.0 00	8	48.703.0 00	8	53.573.0 00	8	58.930.0 00	40	245.731. 000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Jenis	5	8	10.000.0 00	11	11.000.0 00	11	12.100.0 00	11	13.310.0 00	11	14.641.0 00	55	61.051.0 00		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi	Jumlah bacaan dan jasa publikasi yang disediakan	Media massa	22	22	28.000.0 00	32	30.800.0 00	32	33.880.0 00	32	37.268.0 00	32	40.641.0 00	150	170.589. 000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum Harian Pegawai/ Rapat/ Tamu yang disediakan	Bulan	12	12	34.380.0 00	12	37.818.0 00	12	41.600.0 00	12	45.760.0 00	12	50.336.0 00	60	209.894. 000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	70	65	203.338. 000	70	253.838. 000	70	278.914. 000	70	319.251. 000	70	355.639. 000	345	1.410.98 0.000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.19		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Orang	73	73	538.800. 000	73	592.680. 000	73	651.948. 000	73	717.143. 000	73	788.639. 000	73	3.289.21 0.000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.01.20		Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	45	40	35.000.0 00	45	38.500.0 00	45	42.350.0 00	45	46.585.0 00	45	51.244.0 00	220	213.679. 000		Kantor Disnabun
	1.01.3.03.2.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	75	92	207.800. 000	92	1.056.70. 0000	92	735.020. 000	92	684.172. 000	92	634.346. 000	92	3.318.03 8.000		
	1.01.3.03.2.02.03		Pembangunan gedung	Jumlah Gedung Kantor	Unit	1	0	0	1	200.000.	1	150.000.	1	250.000.	0	0	3	600.000.		Kantor

	kantor	yang Dibangun						000		000		000			000		000		Disnabun
1.01.3.03.2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	3	1	15.000.000	5	45.000.000	3	30.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	13	135.000.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	3	0	0	2	30.000.000	2	32.000.000	3	45.000.000	2	32.000.000	9	139.000.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	22	0	0	11	400.000.000	4	100.000.000	4	80.000.000	2	70.000.000	24	650.000.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.10	Pengadaan meubeler	Jumlah Meubelur yang diadakan	Unit	32	3	16.900.000	10	35.000.000	6	36.750.000	8	36.750.000	15	38.588.000	42	163.988.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.11	Pengadaan Komputer	Jumlah Perangkat Komputer yang diadakan	Unit	15	1	14.400.000	4	50.000.000	5	52.500.000	5	55.125.000	5	57.881.000	20	229.906.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.15	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang diadakan	Unit	0	0	0	0	0	4	25.500.000	2	25.500.000	3	25.500.000	2	76.500.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	5	7	25.000.000	10	30.000.000	10	32.000.000	10	35.000.000	10	37.000.000	47	159.000.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	1	17.000.000	1	18.700.000	1	20.570.000	1	22.627.000	1	24.890.000	5	103.787.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Unit	5	5	70.000.000	7	77.000.000	7	84.700.000	7	93.170.000	7	102.487.000	33	427.357.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.52	Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diasuransikan	Unit	1	2	21.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	14	105.000.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang dirhab	Unit	1	1	28.500.000	1	150.000.000	1	150.000.000	0	0	1	200.000.000	5	528.500.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.03	Program Peningkatan Disiplin	Jumlah Persentase Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus yang Disediakan	%	0	95	-	95	123.125.000	95	135.438.000	95	148.981.000	95	163.879.000	95	571.423.000			
1.01.3.03.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Dan Atributnya yang Disediakan	Stel	0	0	0	182	110.000.000	182	121.000.000	182	133.100.000	182	146.410.000	782	510.510.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang Disediakan	Stel	50	0	0	80	13.125.000	80	14.438.000	80	15.881.000	80	17.469.000	320	60.913.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	75	41	71.708.000	42	173.878.000	43	184.523.000	44	197.475.000	45	221.722.000	45	849.306.000			
1.01.3.03.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	Orang	0	0	0	5	45.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	20	220.000.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Orang	0	15	71.708.000	20	128.878.000	15	129.523.000	15	142.475.000	15	156.722.000	80	629.306.000			Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Peternakan dan Perkebunan		58	60	133.590.000	70	168.350.000	80	186.435.000	80	203.378.000	90	221.816.000	90	764.069.000			
1.01.3.03.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang Disusun	Doku men	1	1	10.090.000	1	34.588.000	1	38.048.000	1	41.853.000	1	46.039.000	5	170.618.000			Kantor Disnabun



Realisasi Kinerja OPD																		
1.01.3.03.2.06.02	Penyusunan laporan Keuangan OPD	Jumlah laporan Keuangan OPD Yang Disusun	Doku men	1	2	8.275.000	2	9.103.000	2	10.013.000	2	11.014.000	2	12.115.000	10	50.520.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.06.05	Penyusunan Laporan Tahunan OPD	Jumlah laporan Tahunan OPD yang disusun	Doku men	1	1	7.665.000	1	8.432.000	1	9.275.000	1	10.202.000	1	11.222.000	5	46.796.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.06.06	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD	Jumlah Laporan Aset Yang Disusun	Doku men	1	1	18.380.000	1	20.218.000	1	22.240.000	1	24.464.000	1	26.910.000	5	112.212.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.06.07	Pengelolaan Data Peternakan dan Perkebunan	Jumlah Laporan Data Peternakan dan Perkebunan yang disusun	Doku men	2	1	57.735.000	1	63.509.000	1	69.859.000	1	76.845.000	1	84.530.000	5	352.478.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.06.08	Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan dan Pengendalian kegiatan yang disusun	Doku men	1	1	31.445.000	1	32.500.000	1	37.000.000	1	39.000.000	1	41.000.000	5	31.445.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.07	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Oleh BPK/ Inspektorat	%	0	0	0	100	7.000.000	100	7.500.000	100	8.500.000	100	10.000.000	100	33.000.000		
1.01.3.03.2.07.01	Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Laporan Pengendalian Item Yang Disusun	Doku men	0	0	0	1	7.000.000	1	7.500.000	1	8.500.000	1	10.000.000	4	33.000.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.11	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra	%	75	95	62.525.000	95	60.568.000	95	66.824.000	95	73.707.000	95	90.834.000	95	354.458.000		
1.01.3.03.2.11.01	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (renstra) yang Disusun	Doku men	1	1	7.645.000	0	0	0	0	0	0	0	9.556.000	2	17.201.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.11.02	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD	Doku men	1	1	30.140.000	1	33.254.000	1	36.679.000	1	40.447.000	1	44.592.000	5	185.112.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.11.04	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Yang Disusun	Doku men	2	2	18.920.000	2	20.912.000	2	23.103.000	2	25.514.000	2	28.165.000	10	116.614.000		Kantor Disnabun
1.01.3.03.2.11.06	Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD	Dokumen IKU dan PK OPD Yang Disusun	Doku men	2	2	5.820.000	2	6.402.000	2	7.042.000	2	7.746.000	2	8.521.000	10	35.531.000		Kantor Disnabun
JUMLAH TOTAL																		

## BAB VII

## KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1. di bawah ini, dan indikator Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2. berikut :

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha peternakan	3,41	3,50	3,59	3,68	3,77	3,86
2.	Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha perkebunan	3,49	4,50	4,61	4,73	4,85	4,97
3.	Jumlah Produksi Daging (Kg)	1.781.325,8	1.995.085	2.234.495	2.502.635	2.802.951	3.139.305
4.	Jumlah Produksi Telur (Kg)	611.475,46	657.336	706.636	759.634	816.607	877.852
5.	Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	186.099	200.056	215.061	218.287	234.658	252.257
6.	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	7.745	8.520	9.371	11.339	12.473	13.720
7.	Jumlah Produksi Karet (Ton)	72.192	75.802	79.591,7	83.571,3	87.749,8	92.137,3
8.	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)	99,05	99,30	99,55	99,79	100,04	100,29
9.	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) (%)	96,94	97,18	97,43	97,67	97,91	98,16

Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Program	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Peningkatan Produksi Peternakan	a. Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)	16.703	17.136	19.192	21.495	24.075	26.964	30.199	30.880
		b. Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)	4.359	4.449	4.605	4.651	4.698	4.745	4.792	5.678
		c. Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	31.181	34.148	35.855	37.648	39.531	41.507	43.582	43.582
		d. Jumlah Populasi Ternak Unggas (ekor)	1.741.377	1.741.377	1.915.515	2.107.066	2.317.773	2.549.550	2.804.505	2.804.505
2.	Peningkatan Produksi Perkebunan	a. Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit (Kg /Ha/Th)	4.253	4.253	4.678	5.263	5.921	6.661	7.494	7.494
		b. Peningkatan Produktivitas Kopi (Kg /Ha/Th)	1.133	1.223	1.370	1.534	1.718	1.924	2.155	2.155
		c. Peningkatan Produktivitas Karet (Kg /Ha/Th)	938	941	1.035	1.139	1.253	1.378	1.516	1.516
3.	Penanganan Panen & Pasca Panen Bahan Baku Tembakau	Peningkatan Jumlah Produksi Tanaman Tembakau (Ton)	12	16	16	17	18	19	20	90
4.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Ternak	9,00	9,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
5.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Persentase expo/pameran Yang diikuti (%)	75	75	100	-	-	-	-	100
6.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan	Peningkatan Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)	0	0	4,93	-	-	-	-	4,93
7.	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase kelahiran sapi hasil IB	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

\*Angka sementara

## BAB VIII

## P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Merangin dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 serta isu-isu bidang Peternakan dan Perikanan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 ini telah memuat, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 untuk jangka waktu 2018-2023. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023 ini dapat mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin untuk tahun 2018-2023, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Merangin pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Bangko, 2019

Kepala Dinas  
Peternakan dan Perkebunan  
Kabupaten Merangin,



Kopravi, SP  
Pembina TK.I  
NIP. 19630618 198709 1 001

CASCADING DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019-2023

